

**PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA
2025**



**RENSTRA
2025 – 2029**

**KECAMATAN
MUARA KAMAN**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas terselesaikannya Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029.

Dokumen RENSTRA ini dimaksudkan untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Muara Kaman. Adapun tujuan utama dari penyusunan renstra ini adalah sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan sebagai pelaksana Teknis Kewilayahan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah (Bupati) periode 2025 - 2029.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam membantu penyelesaian dokumen ini.

Akhirnya kami berharap semoga dokumen ini dapat dijadikan acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029.

Muara Kaman, 23 Januari 2026
CAMAT,



Hj. Barliang, S.Sos

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	7
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	7
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	30
BAB 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	45
3.1 Tujuan.....	45
3.2 Sasaran.....	45
3.3 Strategi	49
3.4 Arah Kebijakan	51
BAB 4 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN....	54
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.....	54
4.2 Kegiatan/Sub Kegiatan yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	97
4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	97
BAB 5 PENUTUP	101

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Pegawai Kecamatan Muara Kaman Berdasarkan Klasifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan.....	19
Tabel 2.2	Daftar Jabatan Struktural Kecamatan Muara Kaman	19
Tabel 2.3	Daftar Pegawai Yang Menduduki Jabatan Struktural dan Fungsional Umum.....	20
Tabel 2.4	Jenis Aset Kecamatan Muara Kaman	20
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Muara Kaman	23
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Muara Kaman 2022 - 2025	27
Tabel 2.7	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Sasaran Pembangunan Daerah (T-B.3.5)	31
Tabel 2.8	Isu Strategis Kecamatan Muara Kaman.....	39
Tabel 3.1	Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Muara Kaman	48
Tabel 3.2	Strategi Pencapaian Renstra Kecamatan Muara Kaman 2025-2029	49
Tabel 3.3	Pentahapan Prioritas Pembangunan Renstra Kecamatan Muara Kaman	51
Tabel 3.4	Teknik merumuskan arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah.....	52
Tabel 3.5	Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	52
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Muara Kaman	56
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	63
Tabel 4.3	Kegiatan/Sub Kegiatan Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan daerah	97
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Muara Kaman	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Kecamatan Muara Kaman Selaku Perangkat Daerah	18
Gambar 3.1	Konsep Renja PD	46
Gambar 3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dan Tujuan Sasaran Renstra.....	47
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Muara Kaman.....	55

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kecamatan Muara Kaman merupakan salah satu Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagai Perangkat Daerah, kecamatan memiliki fungsi sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang memiliki wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat, sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan.

Pembangunan jangka menengah di Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk Kecamatan Muara Kaman akan memasuki periode baru yaitu tahun 2025-2029. Dalam melaksanakan pembangunan tersebut perlu disusun dokumen perencanaan jangka menengah. Pasal 272 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) dengan berpedoman pada RPJMD. Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah diharuskan menyusun Renstra Perangkat Daerah.

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara pada tanggal 23 Juli 2025, menandai dimulainya penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dilakukan secara simultan.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029. Tahapan penyusunan Renstra PD meliputi: persiapan, penyusunan Rancangan Awal, penyusunan Rancangan, Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir, dan Penetapan.

RENSTRA Perangkat Daerah merupakan bagian integral dari pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, secara prinsip direncanakan serta disusun sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan Nasional, dilakukan secara bersama oleh seluruh pemangku kepentingan, diintegrasikan dengan tata ruang wilayah dengan memperhatikan potensi, prioritas daerah, isu-isu strategis serta dinamika perkembangan Daerah dan Nasional.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah merupakan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang responsif terhadap kondisi yang dihadapi daerah, berorientasi ke depan dan berupaya membangun masyarakat berbasis perspektif kebutuhan daerah, dengan memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Penyusunan Dokumen Renstra Kecamatan Muara Kaman periode 2025-2029 dilaksanakan melalui proses Teknokratik, Politik, Partisipatif dan *Top Down – Bottom Up* dan secara substansi bersifat *Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial* serta mengacu pada pendekatan “*Money Follow Program*”.

Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan Perda RPJMD. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Muara Kaman menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan.

Penyusunan Dokumen Renstra Kecamatan Muara Kaman 2025-2029 disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
4. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 136);
5. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 No. 1447);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No.7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023- 2042;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
13. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan arahan kebijakan pembangunan Kecamatan Muara Kaman dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 bagi para pemangku kepentingan, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara efisien dan efektif serta didasarkan pada prinsip pemerintahan yang baik (good governance) dan pembangunan berkelanjutan. Tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah, yaitu:

1. Mengidentifikasi capaian kinerja Pembangunan Kecamatan Muara Kaman.
2. Merumuskan permasalahan dan isu strategis Kecamatan Muara Kaman.
3. Menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Muara Kaman untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.
4. Menetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran.
5. Menyediakan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, target, dan pagu indikatif.

6. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Muara Kaman.
7. Menjadi tolak ukur serta bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan Kecamatan Muara Kaman.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025-2030 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yang terdiri dari 5 Bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan mengenai pelayanan Perangkat Daerah yaitu tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya Perangkat Daerah, serta capaian kinerja selama periode Renstra sebelumnya serta permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjabarkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran RPJMD tahun 2025-2029, mengacu pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan Program, Kegiatan, Sub kegiatan melalui proses cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output dengan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dimulai dari tahun 2026 hingga tahun 2030. Pembangunan Daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan Pemerintah Daerah.

BAB 2. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada kecamatan, maka Kecamatan Muara Kaman mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Kecamatan Muara Kaman sebagai Perangkat Daerah Kabupaten merupakan pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

Adapun fungsi Kecamatan Muara Kaman sebagai Perangkat Daerah kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan.

Tata kerja/uraian kerja masing-masing fungsi dalam struktur organisasi Kecamatan Muara Kaman sebagai Perangkat Daerah Kabupaten adalah sebagai berikut :

a. Camat

1. Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan kecamatan;
2. Merumuskan rencana strategis serta kebijakan operasional di bidang tugas pemerintahan, yang meliputi urusan seksi, pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat desa, kesejahteraan sosial dan pelayanan umum;
3. Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ dan LPPD setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta penyusunan LKPD setiap akhir tahun ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan serta pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
6. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan dan penanggulangan bencana;
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, pengendalian program dan kegiatan di tingkat kecamatan;
8. Membina, melaksanakan kerjasama dan berkoordinasi dengan instansi teknis dan organisasi Perangkat Daerah lainnya yang menyangkut bidang tugasnya;
9. Mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan (SP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Camat;
10. Mengkoordinasikan, memfasilitasi, menginventarisir, mengidentifikasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap rencana strategis serta kebijakan operasional di bidang tugas umum pemerintahan, yang meliputi urusan Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum serta membuat

laporan pelaksanaan Program dan Rencana Kerja Tahunan kecamatan; dan

11. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

b. Sekretaris camat.

1. Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja Bawahan;
2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan di lingkungan badan yang meliputi perencanaan, anggaran, pengadaan, penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengembangan kepegawaian;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan administrasi umum meliputi ketatausahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang / jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan *E-Government*, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, pengembangan inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, gratifikasi, layanan pengaduan masyarakat, *Whistle Blowing System* (WBS) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks nilai persepsi korupsi;
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan SIMPEG, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Kompilasi Perjanjian Kinerja dan LP2P;
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan LKjIP, Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), RENSTRA, RENJA, LKPJ, LPPD, dan LKPD;
8. Mengkoordinasikan kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan menyiapkan Surat Perintah Membayar, (SPM), pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan;
9. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali Kenaikan Pangkat, buku kendali Kenaikan

Gaji Berkala, buku kendali Pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul Kenaikan Pangkat, usul Kenaikan Gaji Berkala, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, LHKPN dan/atau LHKASN, Penghargaan, Pemberian Sanksi dan Cuti sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pengelolaan pengadaan dan penghapusan barang/jasa;
11. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan kesekretariatan;
12. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

c. Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

1. menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja Bawahan;
2. Menyusun rencana kegiatan urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengusulkan pembentukan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan barang/jasa meliputi menyusun rencana kebutuhan barang/jasa, menerima, menyalurkan, menyimpan, menginventarisasi Barang Milik Daerah (BMD), memelihara barang serta membuat usulan penghapusan barang rusak berat sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tertib administrasi pengelolaan BMD;
5. Merencanakan pelaksanaan *E-Government*, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System* (WBS) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi dan survei indeks nilai persepsi korupsi;

6. Merencanakan pelaksanaan SIMPEG, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Kompilasi Perjanjian Kinerja;
 7. Merencanakan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali Kenaikan Pangkat, buku kendali Kenaikan Gaji Berkala, buku kendali Pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Rekapitulasi Kehadiran, Laporan Kerja Pegawai, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul Kenaikan Pangkat, Masa Persiapan Pensiun, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, Penghargaan, Pemberian Sangsi, Cuti, pengembangan kompetensi kepegawaian, LHKPN dan/atau LHKASN dan LP2P sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 8. Merencanakan pelaksanaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang / jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 9. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
 10. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian; dan
 11. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.
- d. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
1. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja Bawahan;
 2. Menyusun rencana kegiatan urusan Penyusunan Program dan Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 3. Merencanakan, mengkompilasi dan menyiapkan bahan kegiatan penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA / DPA, Perjanjian Kinerja, LKjIP, dan LPPD melaporkan ke Camat melalui sekretaris;
 4. Merencanakan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), LKPJ dan LKPD;

5. Menganalisis dan meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM)
 6. Menyusun pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran , verifikasi pengelolaan keuangan;
 7. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Penyusunan Program dan Keuangan;
 8. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Penyusunan Program dan Keuangan;
 9. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 10. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.
- e. Kepala Seksi Pemerintahan
1. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja Bawahan;
 2. Menyusun rencana kegiatan urusan Pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 3. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi Pemerintahan yang meliputi Pertanahan dan Kependudukan dan Catatan Sipil yang menjadi urusan kecamatan;
 4. Merencanakan kegiatan, melaksanakan pembinaan serta peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan;
 5. Merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi bidang pertanahan yang merupakan pelimpahan kewenangan dari bupati;
 6. Merencanakan kegiatan dan memfasilitasi penganalisisan materi peraturan desa dan keputusan Lurah yang disampaikan kepada bupati;
 7. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan menyusun monografi kecamatan serta pembinaan penyusunan monografi desa dan atau kelurahan;
 8. Merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas pemerintahan desa dan atau kelurahan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), penyelenggaraan

pemilihan dan pelantikan Kepala Desa, pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta

9. pembentukan Rukun Tetangga;
 10. Merencanakan kegiatan, mengidentifikasi dan memfasilitasi pemekaran desa/kelurahan, penataan maupun perselisihan batas wilayah antar desa dan atau kelurahan serta penyelesaian pengaduan masalah pertanahan dalam wilayah kecamatan;
 11. Merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi program transmigrasi dan penataan penduduk serta pelaporan data tanah kas desa dan kekayaan desa;
 12. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Pemerintahan;
 13. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pemerintahan;m. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pemerintahan; dan
 14. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.
- f. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum
1. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja Bawahan;
 2. Menyusun rencana kegiatan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 3. Merencanakan kegiatan, menginventarisir, melakukan pembinaan dan mengevaluasi permasalahan ketentraman dan ketertiban serta melakukan koordinasi dengan unit terkait yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat desa/kelurahan;
 4. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan proses administrasi perizinan bidang Politik Dalam Negeri / Izin Gangguan (HO) yang merupakan pelimpahan kewenangan dari bupati;
 5. Merencanakan kegiatan, melakukan upaya preventif terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 6. Merencanakan kegiatan, melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data keberadaan, kegiatan partai politik, organisasi kemasyarakatan,

- lembaga swadaya masyarakat tingkat Kecamatan dan mantan anggota organisasi terlarang serta data WNI keturunan dan WNA;
7. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan ideologi, organisasi kemasyarakatan dan kesatuan bangsa serta pembinaan
 8. kerukunan umat beragama;
 9. Merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
 10. Merencanakan kegiatan melakukan pencegahan atas penanggulangan permasalahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat, narkoba, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya serta pengelolaan Sumber Daya Alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
 11. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
 12. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
 13. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
 14. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan;
- g. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
1. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja Bawahan;
 2. Menyusun rencana kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 3. Merencanakan kegiatan dan menyelenggarakan proses administrasi yang meliputi perizinan bidang pertanian, pertambangan, perindustrian, perdagangan, Izin Mendirikan Bangunan dan Pariwisata yang merupakan pelimpahan kewenangan dari bupati;
 4. Merencanakan kegiatan, memfasilitasi, melaksanakan pemberdayaan masyarakat, peningkatan peran serta, prakarsa, dan

swadaya gotong royong masyarakat serta pemberdayaan peranan wanita;

5. Merencanakan kegiatan, melaksanakan pemantauan dan pelaporan obyek dan daya tarik wisata, usaha jasa pariwisata dan usaha sarana pariwisata;
 6. Merencanakan kegiatan, melakukan bimbingan dan pemantauan pengelolaan Lokasi Daur Ulang Sampah (LDUS) dan Air Bersih Perdesaan; merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi dan sosialisasi rencana tata ruang;
 7. Merencanakan kegiatan, melakukan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan penghijauan, rehabilitasi lahan, konservasi tanah dan air;
 8. Merencanakan kegiatan, menyusun rencana dan program kegiatan kebersihan, pertamanan dan keindahan lingkungan;
 9. Merencanakan kegiatan, menghimpun, mengolah data, membuat bahan masukan untuk pengembangan sarana dan prasarana umum;
 10. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 11. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 12. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 13. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.
- h. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
1. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja Bawahan;
 2. Menyusun rencana kegiatan urusan Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 3. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita dan olahraga, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 4. Merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi bidang ketenagakerjaan AK/1 (Pencari Kerja Swasta) dan pendidikan

luar sekolah, pemuda dan olahraga yang merupakan pelimpahan kewenangan dari bupati;

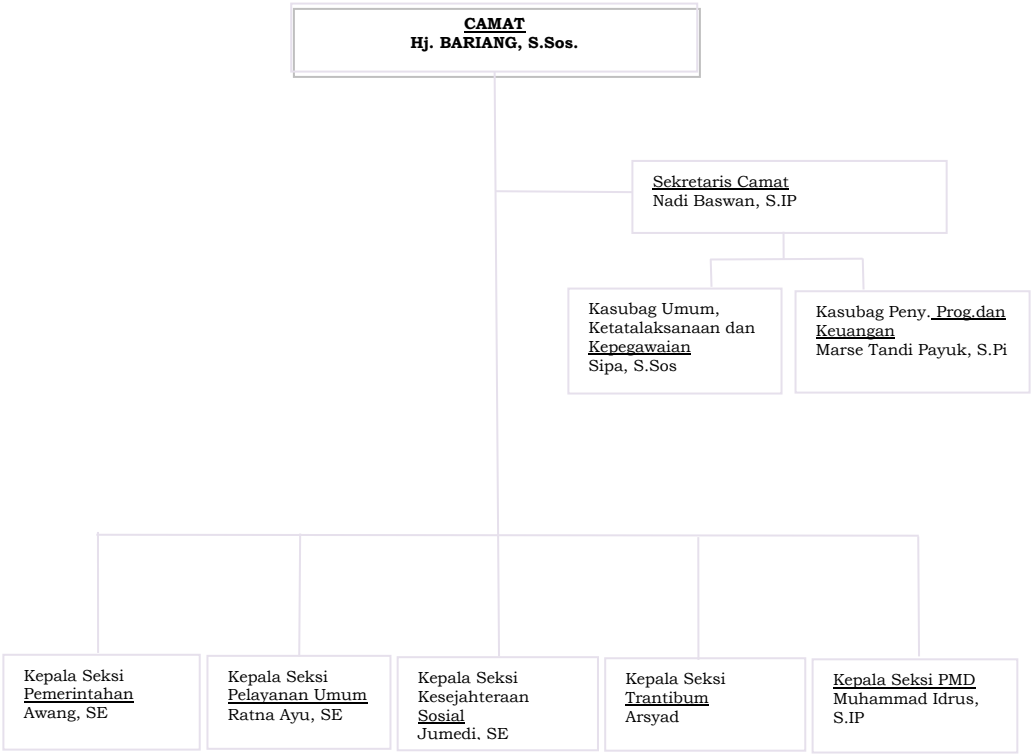
5. Merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi program
 6. yang meliputi bantuan sosial, organisasi sosial kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Keluarga Berencana (KB), Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 7. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan petunjuk dalam rangka pembinaan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan kursus keterampilan, kesejahteraan keluarga, peranan wanita dan organisasi kewanitaan;
 8. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan bimbingan dan penyuluhan sosial bagi anak terlantar, yatim piatu, penyalahgunaan narkoba dan penyandang masalah sosial;
 9. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan kegiatan dalam rangka pembinaan, pengembangan kepramukaan, karang taruna, organisasi kepemudaan dan keolahragaan;
 10. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan kegiatan dalam rangka pembinaan pendidikan sekolah maupun luar sekolah, dan pendataan sarana dan prasarana pendidikan;
 11. Merencanakan kegiatan, menghimpun, menyiapkan bahan, mengevaluasi pembinaan keagamaan dan kerukunan hidup beragama dan memfasilitasi pengadaan sarana / prasarana peribadatan dan kehidupan beragama;
 12. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Kesejahteraan Sosial;
 13. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Kesejahteraan Sosial;
 14. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan kesejahteraan sosial; dan
 15. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.
- i. Kepala Seksi Pelayanan Umum
1. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja Bawahan;
 2. Menyusun rencana kegiatan urusan Pelayanan Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

3. Merencanakan kegiatan, meneliti, melakukan verifikasi persyaratan berkas permohonan perizinan dan menetapkan besaran retribusi serta berkoordinasi dengan instansi terkait tentang pelayanan perijinan dan non perizinan;
4. Merencanakan kegiatan, mengkoordinasikan pengendalian pengelolaan lampu penerangan jalan umum, memfasilitasi dan melakukan pungutan atas pembinaan, pemantauan pengelolaan sampah dan pemeliharaan lingkungan,
5. pertamanan dan pemakaman;
6. Merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi perizinan bidang pekerjaan umum dan bidang perhubungan yang merupakan pelimpahan kewenangan dari bupati;
7. Merencanakan kegiatan, melakukan bimbingan dan pemantauan pengelolaan sampah dan pemeliharaan kebersihan lingkungan dan taman;
8. Merencanakan kegiatan, menghimpun dan mengolah data perencanaan pengembangan kekayaan desa/kelurahan serta pelaporan data tanah kas desa dan kekayaan desa;
9. Merencanakan kegiatan, menyusun rencana dan program kegiatan kebersihan, pertamanan dan keindahan lingkungan;
10. Merencanakan kegiatan, menghimpun, memantau, mengolah data, membuat bahan masukan untuk pengembangan sarana dan prasarana umum;
11. Merencanakan kegiatan, melaksanakan sosialisasi dan pengendalian perizinan perumahan dan bangunan;
12. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Pelayanan Umum;
13. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pelayanan Umum;
14. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pelayanan Umum; dan
15. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Susunan Organisasi Kecamatan Muara Kaman sebagai Perangkat Daerah Kabupaten menurut Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Camat,
 - 1) Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Seksi Pelayanan Umum;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Muara Kaman Sebagai Perangkat Daerah Kabupaten



2.1.2 Sumberdaya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor Kunci dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan Muara Kaman selaku Perangkat Daerah Kabupaten, yaitu menyelenggarakan urusan

Pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah (Bupati). Dalam mencapai tujuan organisasi, diperlukan SDM yang Proporsional pada aspek Kuantitas, Profesionalisme dan Cakap pada aspek Kualitas. Sejalan dengan berkembangnya organisasi dan tuntutan pelayanan prima, maka SDM, dalam hal ini Aparatur Kecamatan Muara Kaman harus terus meningkatkan kompetensi diri agar dapat memenuhi target kinerja organisasi.

Jumlah SDM di lingkungan Kantor Kecamatan Muara Kaman Desember 2024 sebanyak 60 orang dengan pendistribusian menurut kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.1.di bawah ini.

Tabel 2.1. Data Pegawai Kecamatan Muara Kaman Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan.

No	Pangkat dan Golongan	Kualifikasi Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1	D3	S M A	S M P	SD	
1	Pembina Gol. IV / a	-	-	1	-	-	-	-	1
2	Penata Tk.I Gol. III/d	-	-	5	-	-	-	-	5
3	Penata Gol. III/c	-	-	3	-	-	-	-	3
4	Penata Muda Tk.I Gol. III/b	-	-	2	-	-	-	-	2
5	Penata Muda Gol. III/a	-	-	-	1	-	-	-	1
6	Pengatur Tk.I Gol. II/d	-	-	-	-	20	-	-	20
7	Pengatur Gol. II/c	-	-	-	-	10	-	-	10
8	Pengatur Muda Tk.I Gol. II/b	-	-	-	-	10	-	-	10
9	Pengatur Muda Gol. II/a	-	-	-	-	1	-	-	1
10	Juru Tk.I Gol. I/d	-	-	-	-	-	2	1	3
11	Juru Gol. I/c	-	-	-	-	-	-	-	0
12	Juru Muda Tk.I Gol. I/b	-	-	-	-	-	-	2	2
15	Juru Muda Gol. I/a	-	-	-	-	-	-	-	0
	J U M L A H	-	-	30	2	25	2	3	60

Sumber: bagian kepegawaian Kecamatan Muara Kaman, Juni 2025.

Tabel 2.2. Daftar Jabatan Struktural Kecamatan Muara Kaman.

No	Lokasi	Nama Jabatan	Jumlah
1.	Kecamatan Muara Kaman	Camat	1
		Sekretaris Camat	1
		Kepala Seksi	5
		Kepala Sub Bagian	2
		Jumlah	9

Sumber: bagian kepegawaian Kecamatan Muara Kaman, Juni 2025

Tabel 2.3. Data Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural dan Fungsional Umum

No	Jabatan Jabatan	Jumlah
1.	Jabatan Struktural	60
	- Eselon III	2
	- Eselon IV	7
2.	Jabatan Pelaksana	51

Sumber: bagian kepegawaian Kecamatan Muara Kaman, Juni 2025.

Aset yang dimiliki oleh Kecamatan Muara Kaman selaku Perangkat Daerah Kabupaten terdiri dari 6 jenis utama meliputi: (1) Tanah dan Bangunan; (2) Kendaraan Bermotor; (3) Peralatan Kantor; (4) Peralatan Mesin; (5) Peralatan Ukur dan (7) *Meubelair*.

Adapun jenis jenis dan jumlah aset disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.4. Jenis Aset Kecamatan Muara Kaman

NO	JENIS ASET	JUMLAH ASET	SATUAN	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI ASET
1.	TANAH DAN BANGUNAN				
1.1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3.967	M²	2005	Baik, berada pada 3 Lokasi
1.2.	Tanah			2008	Baik
1.3.	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Kantor Dinas Perikanan, Kantor UPT Dinas Kelautan dan Perikanan, Kantor Satelite Station Bumi, Kantor Reservat, TPI)	12	Unit	2005-2013	Baik
1.4.	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	2	Unit	2005	Baik
1.5.	Rumah Negara	1	Unit	2005	Baik
1.6.	Pos Pengawasan	5	Unit	2015-2014	Baik
2.	KENDARAAN BERMOTOR				
2.1.	Kendaraan Roda 4 (Station Wagon)	7	Unit	2007	Baik
		4	Unit	2008	Baik
2.2.	Kendaraan Roda 4 (Pick Up)	2	Unit	2008	Baik
2.3.	Sepeda Motor	4	Unit	2006	Baik
		7	Unit	2007	Baik
		33	Unit	2008	Baik
		2	Unit	2010	Baik
		4	Unit	2011	Baik
		5	Unit	2013	Baik
2.4.	Kapal Motor	12	Unit	2008	Baik
		6	Unit	2009	Baik
2.5.	<i>Speed Boat</i>	2	Unit	2007	Baik
2.6	Alat Pengolahan		Unit		Baik
2.7.	<i>Motor Boat</i>	5	Unit	2007	Baik
		2	Unit	2011	Baik
		1	Unit	2012	Baik
		4	Unit	2013	Baik
2.8	Kapal Penangkap Ikan	2	Unit	2009	Baik
		2	Unit	2010	Baik
3.	PERALATAN KANTOR				Baik
3.1.	Laptop	2	Unit	2006	Baik
		5	Unit	2009	2 Unit Rusak Berat
		4		2011	
3.2.	<i>Note Book</i>	15	Unit	2007	2 Unit Rusak Berat
		29	Unit	2008	4 Unit Rusak Berat
		1	Unit	2009	
		35	Unit	2010	
		3	Unit	2013	Baik

NO	JENIS ASET	JUMLAH ASET	SATUAN	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI ASET
3.3.	<i>Personal Komputer</i>	1	Unit	2005	Baik
		1	Unit	2006	Baik
		7	Unit	2007	Rusak Berat
		14	Unit	2008	Rusak Berat
		4	Unit	2010	Baik
		2	Unit	2014	Baik
3.4.	<i>Printer</i>	1	Unit	2006	Baik
		1	Unit	2007	Baik
		29	Unit	2008	Rusak Berat
		2	Unit	2009	Rusak Berat
		11	Unit	2010	Baik
		13	Unit	2011	6 Unit Rusak Berat
		10	Unit	2013	Baik
		11	Unit	2014	Baik
3.5.	<i>Scanner</i>	1	Unit	2006	Baik
		1	Unit	2008	Rusak Berat
3.6.	<i>GPS</i>	1	Unit	2006	Baik
		1	Unit	2007	Baik
		1	Unit	2008	Baik
3.7.	<i>Proyektor / Infocus</i>	1	Unit	2008	Rusak Berat
		1	Unit	2009	Baik
		1	Unit	2014	Baik
3.8.	<i>Faksimile</i>	2	Unit	2006	Baik
3.9.	Mesin Penghancur Kertas	1	Unit	2008	Baik
		2	Unit	2012	Baik
3.10.	Mesin Ketik	1	Unit	2007	Baik
		4	Unit	2010	Baik
		4	Unit	2011	Baik
3.11.	Mesin Ketik Listrik	1	Unit	2008	Baik
		4	Unit	2012	Baik
		17	Unit	2013	Baik
3.12.	Peralatan Studio Visual	1	Unit	2005	Baik
		2	Unit	2010	1 Unit Rusak Berat
3.13.	Kamera	1	Unit	2007	Baik
		1	Unit	2008	Baik
		1	Unit	2009	Baik
		8	Unit	2010	Baik
		19	Unit	2013	Baik
3.14.	<i>Handy Cam</i>	1	Unit	2007	Baik
		1	Unit	2008	Baik
		1	Unit	2010	Baik
3.15.	<i>UPS</i>	1	Unit	2006	Baik
		1	Unit	2007	Baik
		1	Unit	2008	Baik
		1	Unit	2009	Baik
		4	Unit	2010	Baik
		2	Unit	2011	Baik
		2	Unit	2014	Baik
3.16.	<i>Telephone</i>	11	Unit	2008	Baik
3.17.	<i>Air Conditioner (AC)</i>	1	Unit	2009	Baik
		5	Unit	2010	Baik
		2	Unit	2011	Baik
		2	Unit		Baik
3.18.	Kipas Angin	3	Unit	2009	Rusak Berat
		1	Unit	2010	Baik
3.19.	Mesin Absensi	1	Unit	2013	Baik
		1	Unit	2014	Baik
4.	PERALATAN MESIN				
4.1.	Alat Panen / Pengolahan Lain-Lian	1	Unit	2005	Baik
4.2.	Compressor Pengisi Tabung Selam	1	Unit	2010	Baik
4.3.	Genset	2	Unit	2010	Baik
			Unit		Baik
			Unit		Baik
4.4.	Mesin Pembuat Pakan	1	Unit	2010	Baik
4.5.	Mesin Pemotong Rumput	2	Unit	2010	Baik
5.	PERALATAN UKUR				
5.1.	Alat Ukur Kualitas Air	1	Unit	2009	Baik
5.2.	<i>Fish Finder</i>	1	Unit	2006	Baik
		1	Unit	2010	Baik
		8	Unit	2009	Baik
5.3.	Alat Selam	1	Unit	2009	Baik
			Unit		Baik
5.4.	Alat Pemadam	2	Unit	2010	Baik
		1	Unit	2013	Baik

NO	JENIS ASET	JUMLAH ASET	SATUAN	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI ASET
6.	MEUBELAIR				
6.1.	Filling Besi – Kayu	1	Unit	2008	Baik
		1	Unit	2010	Baik
		2	Unit	2012	Baik
		2	Unit	2014	Baik
6.2.	Lemari Kayu	1	Unit	2008	Baik
6.3.	Lemari Arsip	17	Unit	2013	Baik
6.4.	Meja Kerja	20	Unit	2010	Baik
		2	Unit	2011	Baik
		12	Unit	2012	Baik
		42	Unit	2013	Baik
6.5.	Meja Rapat	1	Unit	2010	Baik
		1	Unit	2011	Baik
6.6.	Kursi Rapat	4	Unit	2010	Baik
		25	Unit	2011	Baik
6.7.	Kursi Kerja	2	Unit	2011	Baik
		57	Unit	2012	Baik
		14	Unit	2013	Baik
6.8.	Kursi Tamu	10	Unit	2009	Baik
		11	Unit	2013	Baik
6.9.	Kursi Lipat	50	Unit	2009	Baik
		6	Unit	2010	Baik
6.10.	Bangku Tunggu	2	Unit	2010	Baik

Sumber: bagian umum Kecamatan Muara Kaman, Juni 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Kinerja pelayanan Kecamatan Muara Kaman pada dasarnya diukur menurut indikator-indikator Kinerja Sasaran / Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Muara Kaman selaku Perangkat Daerah Kabupaten sebagai pelaksana Teknis Kewilayahan yaitu menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

Indikator Kinerja Utama berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Muara Kaman adalah Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan, Persentase Keluhan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan yang ditindaklanjuti, Persentase capaian ketentraman dan Ketertiban Umum, Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa, Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan.

Realisasi kinerja berdasarkan data yang ada selama periode pelaksanaan Renstra 2022-2026 secara umum menggambarkan capaian yang baik dengan tingkat keberhasilan rata rata 80%. Namun demikian, capaian terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan tidak terealisasi. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan pengalihan kewenangan pelaksanaan pungutan di wilayah kecamatan, sehingga kecamatan selaku Perangkat Daerah Kabupaten tidak dapat melakukan pungutan sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah di wilayah kecamatan.

Pencapaian Kinerja pelayanan Kecamatan Muara Kaman selaku Perangkat Daerah Kabupaten disajikan dalam table berikut:

Tabel 2.5 Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Muara Kaman.

No	Indikator Kinerja.	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Renstra Tahun Ke-					Rasio Capaian Renstra Tahun Ke-				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan.	83,7	86,8	86,9	87	87,1	80	82	85	-	-	95,7	94,4	97,8	-	-
2.	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti.	75	75	75	75	75	75	75	75	-	-	100	100	100	-	-
3.	Persentase capaian ketentraman dan Ketertiban Umum.	80	80	80	80	80	80	80	80	-	-	100	100	100	-	-
4.	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa.	35	35	35	35	35	1	-	-	-	-	1	0	0	-	-
5.	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan.	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-
6.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah.	67	67	67	67	67	30,2	68,88	71,05	-	-	45,07	102,8	106,04	-	-
7.	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	45	45	45	45	45	45	45	45	-	-	100	100	100	-	-
8.	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel.	24	24	24	24	24	24	24	24	-	-	100	100	100	-	-
9.	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministra sikan.	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	100	100	100	-	-
10.	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah.	1097	1202	1202	1202	1202	1097	1202	1202	-	-	100	100	100	-	-
11.	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	0	2	2	2	2	0	2	2	-	-	0	100	100	-	-
12.	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan.	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	100	100	100	-	-
13.	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang	14	16	16	16	16	14	16	16	-	-	100	100	100	-	-

No	Indikator Kinerja.	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Renstra Tahun Ke-					Rasio Capaian Renstra Tahun Ke-				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	dipelihara.															
14.	Persen pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP.	80	80	80	80	80	80	80	80	-	-	100	100	100	-	-
15.	Tingkat aksesibilitas wilayah kecamatan.	45	45	45	45	45	45	45	45	-	-	100	100	100	-	-
16.	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi.	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	100	100	100	-	-
17.	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.	-	1	1	1	1	-	1	1	-	-	0	100	100	-	-
18.	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat.	530	526	526	526	526	530	526	526	-	-	100	100	100	-	-
19.	Presentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang aktif.	100	100	100	100	100	80	90	95	-	-	80	90	95	-	-
20.	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan desa / kelurahan.	157	157	157	157	157	125	130	135	-	-	79,6	82,8	85,9	-	-
21.	Persen kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah kecamatan.	N.a	100	100	100	100	N.a	100	100	-	-	100	100	100	-	-
22.	Cakupan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.	N.a	100	100	100	100	N.a	100	100	-	-	N.a	100	100	-	-
23.	Jumlah urusan Pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan.	0	11	11	11	11	-	11	11	-	-	0	100	100	-	-
24.	Presentase desa yang memiliki predikat	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	100	100	100	-	-

No	Indikator Kinerja.	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Renstra Tahun Ke-					Rasio Capaian Renstra Tahun Ke-				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	penyelenggaraan kinerja pemerintahan desa kategori baik.															
25.	Jumlah desa yang difasilitasi.	20	20	20	20	20	20	20	20	-	-	100	100	100	-	-

Sumber: Renstra 2022-2026 dan e_Pantau Kukar 2022-2024.

Kinerja anggaran Kecamatan Muara Kaman ditinjau pada realisasi terhadap anggaran dan pertumbuhan anggaran definitif dari tahun ke tahun sangat baik. Kepatuhan terhadap proses penatausahaan keuangan sesuai dengan prosedur / SOP menjadi salah satu kunci keberhasilan penatausahaan keuangan Kecamatan Muara Kaman, disamping adanya pendampingan Inspektorat, BPKP dan BPK secara reguler . Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan disajikan secara lebih lengkap dalam table berikut:

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Muara Kaman 2022 – 2026.

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Presentase antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota.	10.065.621.582	14.065.621.582	11.286.582.679	10.624.411.893	10.002.621.000	13.850.621.000	11.206.500.000	-	98	96	99	-	5	2
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	8.147.999.000	31.147.999.000	23.728.651.798	10.221.035.143	8.045.100.000	30.920.900.000	23.620.500.000	-	95	92	98	-	50	3
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Keurahan	391.866.000	1.486.900.000	391.866.000	623.979.053	351.200.000	1.485.000.000	391.750.000	-	96	99	97	-	65	2
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	50.000.000	50.000.000	0	113.533.000	49.005.100	48.920.000	0	-	98	98	-	-	25	0
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	210.000.000	210.000.000	430.360.000	283.805.000	209.410.000	208.100.000	430.350.000	-	99	98	98	-	10	1
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	50.000.000	250.000.000	50.000.000	158.269.200	49.510.000	150.200.000	49.780.000	-	96	68	96	-	5	5

Sumber: DPA/DPPA dan laporan keuangan2022-2024 Muara Kaman

Dalam beberapa tahun terakhir, Kecamatan Muara Kaman menghadapi perubahan yang signifikan, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Peningkatan kebutuhan infrastruktur, pertumbuhan populasi, serta tekanan pada sumber daya alam menjadi perhatian utama dalam penyusunan rencana strategis ini. Pendekatan yang holistik dan berbasis data diperlukan untuk menjamin pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Data-data yang ditunjukkan dalam tabel tersebut mengindikasikan bahwa selama periode tahun 2022 – 2024, kinerja keuangan Kecamatan Muara Kaman sangat baik dengan rasio antara realisasi dan anggaran mencapai rata rata 98%. Pertumbuhan anggaran dari tahun ke tahun berdasarkan data pada tabel di atas mengalami kenaikan yang mengindikasikan adanya keberpihakan kebijakan Pemerintah Daerah yang menitikberatkan pembangunan dimulai dari Desa.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran Layanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Muara Kaman yaitu :

1. Penduduk kecamatan : Semua individu yang terdaftar sebagai penduduk di wilayah kecamatan.
2. Perangkat daerah : Aparatur pemerintah kecamatan dan kelurahan/ Desa
3. Organisasi kemasyarakatan : Lembaga-lembaga swadaya masyarakat, organisasi pemuda, PKK, dan lain-lain.
4. Dunia usaha : Pelaku bisnis dan industri kecil di kecamatan.
5. Kelompok rentan : Termasuk perempuan, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin.
6. Pihak lain yang membutuhkan pelayanan : Institusi pendidikan, tempat ibadah, dan lain-lain

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pelayanan.

Dalam pemberian layanan, Kecamatan Muara Kaman dalam beberapa layanan bekerja sama dengan beberapa Perangkat Daerah yang ada di wilayah Kecamatan Muara Kaman maupun Perangkat Daerah yang berada di luar wilayah Kecamatan Muara Kaman antara lain:

1. Polsek Kecamatan Muara Kaman, untuk menyediakan layanan keamanan, penegakan hukum dan ketertiban masyarakat serta membantu penanganan konflik sosial, kriminalitas, serta kegiatan pengamanan acara di masyarakat,

2. Koramil Muara Kaman, untuk membantu dalam aspek pertahanan dan keamanan, serta kegiatan sosial kemasyarakatan,
3. Kantor Urusan Agama, mitra dalam hal administrasi pernikahan,
4. Satuan Polisi Pamong Praja, Mitra dalam menjamin rasa aman pada lingkungan,
5. Kesbangpol, mitra dalam memberikan pemahaman wawasan kebangsaan dan peningkatan partisipasi publik dalam kehidupan berdemokrasi,
6. Damkar, mitra dalam hal penanggulangan kebakaran di lingkungan perumahan,
7. BPBD, mitra dalam mitigasi dan penanggulangan bencana, seperti kebakaran lahan, banjir dan bencana lainnya,
8. Dinas Pertanian dan Perkebunan, mitra dalam penyediaan bantuan alat-alat pertanian dan bibit kelapa sawit
9. DP3A, mitra dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap anak
10. Perkim, mitra dalam penyediaan data dalam program bedah rumah tidak layak huni.
11. DLHK, mitra dalam hal pengelolaan sampah.
12. Puskesmas, untuk melakukan pelaksanaan Donor Darah dan pengurusan BPJS Kesehatan untuk masyarakat yang tidak mampu.
13. Bappeda, untuk memberikan berbagai pelayanan kepada kecamatan, terutama dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Bappeda juga melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan kecamatan untuk memastikan bahwa pembangunan di wilayah Kecamatan Muara Kaman berjalan dengan baik dan terarah.
14. DPMD, untuk pemberdayaan masyarakat, pengembangan desa/Kelurahan dan koordinasi kegiatan di tingkat kecamatan. DPMD juga memberikan pendampingan teknis, fasilitasi, dan pembinaan terhadap berbagai program dan kegiatan di tingkat desa.
15. Disdukcapil, mitra kerja dalam hal pelayanan penerbitan Akta Kelahiran Tuntas dan penerbitan Kartu Keluarga Tuntas di kecamatan serta perekaman KTP-elektronik bagi pemula.
16. Tim Penggerak PKK Kecamatan, meliputi berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pelaksanaan program PKK, bimbingan kepada kelompok PKK di tingkat RT. TP PKK Kecamatan juga berperan dalam menginformasikan program-program PKK kepada

masyarakat dan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan. Diadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan stunting di wilayah Kecamatan Muara Kaman.

17. Inspektorat, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan, serta evaluasi kinerja dan kepatuhan terhadap peraturan. Inspektorat juga menyediakan layanan konsultasi bagi kecamatan.
18. Bapenda, mitra kerja pelayanan di kecamatan yaitu meliputi tugas pemungutan, pelayanan, dan sosialisasi pajak daerah.
19. Dinas Sosial, mitra pelayanan di kecamatan yang fokus pada kesejahteraan sosial seperti bantuan langsung kepada masyarakat dan update data kesejahteraan sosial.
20. Dinas Koperasi, mitra kerja terkait UMKM dalam hal pembinaan, seperti pelatihan, bantuan permodalan, pendampingan izin usaha, serta fasilitas pengembangan dan perlindungan usaha.
21. Dinas Perhubungan, mitra kerja terkait dengan LPJU dan transportasi pada wilayah kecamatan.
22. Diskominfo, mitra dalam penyediaan layanan jaringan telekomunikasi.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.

Dalam menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar penentuan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan PD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Muara Kaman. Permasalahan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029 meliputi seluruh hambatan, tantangan, dan kendala yang menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dengan keadaan riil di wilayah tersebut. Kondisi tersebut biasanya terdiri dari beberapa dimensi yang kompleks dan saling berkaitan, misalnya permasalahan sosial seperti kemiskinan, kesenjangan yang tidak terlepas dari keterbatasan sumber daya dan ketidakmerataan akses terhadap pelayanan. Pada aspek kewilayahan, permasalahan utama yang teridentifikasi adalah “belum optimalnya layanan publik di kecamatan”.

Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Berdasarkan analisa terhadap gambaran umum dan evaluasi terhadap capaian kinerja Kecamatan Muara Kaman dan dielaborasi dengan permasalahan riil yang dihadapi, berikut disajikan permasalahan dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi pelaksana Teknis Kewilayahan di Muara Kaman. Perumusan masalah dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu pokok masalah, masalah, dan akar masalah.

Tabel 2.7 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah (T-B.3.5)

POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
Belum optimalnya Pelayanan Kecamatan	Belum optimalnya pelayanan perijinan dan non perijinan yang sesuai dengan SOP	Kurangnya pemahaman Kebijakan/Regulasi baik berupa delegasi maupun pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat
		Masih minimnya infrastruktur yang mendukung dalam pelayanan publik khususnya berbasis digital
		Kurangnya tenaga teknis dengan keahlian khusus dalam memberikan pelayanan
		Kurangnya harmonisasi kebijakan lintas sektor yang berdampak pada pelaksanaan pelayanan publik.
		Sosialisasi kebijakan atau program kecamatan yang belum merata
		Adanya hambatan proses pencetakan e-KTP karena mesin rusak
	Belum optimalnya efektivitas implementasi program, khususnya pada kewenangan yang sudah dilimpahkan ke kecamatan	Tumpang tindih kebijakan antara kecamatan dan kabupaten (perangkat daerah teknis)
		Rendahnya sinergi antara kecamatan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan program lintas sektoral.
		Kurangnya pedoman teknis terkait pelaksanaan pelimpahan kewenangan.
		Belum optimalnya pembinaan terhadap Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan
	Masih adanya permasalahan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, konektivitas, trantibum, lingkungan hidup, dan perlindungan sosial terutama terhadap kelompok rentan dan marjinal (perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat miskin, masyarakat adat, dll.)	Belum optimalnya koordinasi pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan infrastruktur dengan perangkat daerah lain dan pihak terkait
		Belum optimalnya pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
		Keterbatasan infrastruktur teknologi yang menjangkau seluruh wilayah kecamatan
		Kemampuan ekonomi sebagian masyarakat yang rendah sehingga terbatas dalam memenuhi kebutuhan dasarnya
		Keterbatasan akses jalan menuju kantor kecamatan atau desa tertentu
		Belum tersedianya transportasi umum yang memadai untuk menuju kecamatan, hanya tersedia moda transportasi antar kota.
		Masih adanya gangguan ketentraman dan ketertiban umum
		Belum optimalnya pembinaan koperasi dan UMKM bersama dengan dinas teknis
		Belum optimalnya pembinaan pengelolaan keuangan desa yang diprioritaskan untuk mendukung prioritas daerah dan nasional, antara lain penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, stunting, dll
		Kerusakan ekosistem akibat penambangan batubara ilegal di sekitar Waduk Samboja
	Belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Desa	Belum optimalnya peran aktif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Masih terbatasnya kemampuan aparatur desa dalam mengelola pendapatan asli desa
		Masih terbatasnya pembinaan terhadap aparatur desa
		Belum optimalnya pengelolaan BUMDes
	Belum optimalnya tata kelola kecamatan	Minimnya pelaksanaan forum atau pertemuan rutin untuk membahas program lintas sektoral di tingkat kecamatan

POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
		Belum optimalnya pembinaan terhadap pelaksanaan tugas di kecamatan oleh perangkat daerah yang memiliki kewenangan pengawasan internal pemda.
		Kekurangan staf yang kompeten untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis.
		Kurangnya pelatihan bagi perangkat kecamatan tentang pengelolaan administrasi modern, termasuk pengelolaan keuangan.
		Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam program yang diselenggarakan kecamatan
		Tidak adanya sistem pencatatan data yang terintegrasi secara real-time.
		Lemahnya pengawasan dan verifikasi dalam pengumpulan dan pengelolaan data.

Sumber : hasil analisis, 2025.

2.2.2 Isu Strategis.

Isu strategis merupakan permasalahan dan atau peluang yang berdampak besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Muara Kaman. Penetapan isu strategis didasarkan pada hasil analisis pada isu isu global, nasional dan regional yang relevan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan selaku Perangkat Daerah pelaksana Teknis Kewilayahan untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

- a. Telaahan Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Visi merupakan keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, dimana visi mengenai pembangunan Daerah dalam RPJMD merupakan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Visi Kepala Daerah periode 2025-2029 adalah :

KUKAR IDAMAN TERBAIK “Terwujudnya Pondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”. Dalam visi ini terkandung tiga rumusan pokok yaitu “Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”. Ketiga rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun ke depan, maka penjabaran makna pokok visi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara dijelaskan sebagai berikut.

1. Maju, pokok visi ini berfokus pada peningkatan sektor ekonomi, infrastruktur dan tata kelola. Pemerintah Daerah berupaya menciptakan perekonomian yang inklusif dengan mengembangkan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan

industri berbasis sumber daya lokal yang dikelola secara berkelanjutan.

2. Sejahtera, pokok visi ini menggambarkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang dilandasi dengan budaya kearifan lokal.
3. Berkelanjutan, Kutai Kartanegara yang diproyeksikan menjadi kawasan industri hijau harus mengedepankan prinsip keberlanjutan. Pembangunan berkelanjutan diwujudkan melalui upaya menjaga keseimbangan lingkungan hidup sebagai dasar bagi pembangunan jangka panjang.

Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, sebagai berikut :

1. MISI 1: Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial.
2. MISI 2: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif.
3. MISI 3: Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara.
4. MISI 4: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal.
5. MISI 5: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan.

Implementasi setiap Misi dijabarkan dalam bentuk program, baik program prioritas maupun program dedikasi.

Dari ke 5 (lima) Misi, berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Muara Kaman, mendukung dalam pencapaian Misi 3 (tiga) dengan Program Dedikasi Pelayanan Publik Cerdas dan Misi ke 4 (empat) dengan Program RT Ku Terbaik.

- Program Pelayanan Publik Cerdas.

Merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas layanan publik, dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi informasi sebagai pendorong dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *smart and good governance* hingga tercipta tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan Daerah,

dengan kegiatan prioritas adalah pembangunan Mini Mall Pelayanan Publik Cerdas pada setiap kecamatan yang diintegrasikan dengan konsep kecamatan sebagai Pusat Data dan Layanan Informasi.

- **Program RT Ku-Terbaik.**

Merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk mendorong dan mengoptimalkan peran lembaga RT sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas ketertiban dan kenyamanan warga, dengan memperkuat Program 50 juta per RT, menjadi minimal 150 juta Per-RT dan dapat terus ditingkatkan sesuai dengan kapasitas fiskal Daerah, program ini diarahkan pada penguatan hubungan sosial kemasyarakatan, keamanan, keagamaan, bina lingkungan, prasarana dan sarana umum pada skala RT, serta memperkuat penyediaan data administrasi kependudukan yang lebih aktual dan valid yang dikemas dalam program-program swakelola tematik sesuai dengan hasil musyawarah RT yang sejalan dengan prioritas pembangunan Daerah. Dalam hal mengawal proses pelaksanaan program, maka diperkuat dengan peningkatan kapasitas Pendekar Idaman, dengan pola kerja yang terstruktur, responsif, cakap dalam mengelola dinamika pembangunan desa/kelurahan secara bertanggung jawab. Khusus untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum, maka diperkuat dengan optimalisasi aparat keamanan di tingkat satuan wilayah terkecil (desa/kelurahan) yakni Penyediaan bantuan operasional Babinsa dan Babinkamtibmas, serta untuk memperkuat aktivitas pemberdayaan masyarakat di wilayah desa/kelurahan, maka alokasi RT dapat menunjang peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan memberikan bantuan operasional/insentif, selanjutnya pola distribusi alokasi program per RT diperkuat pula dengan pengalokasian anggaran per tahun secara proporsional berdasarkan jumlah Kepala Keluarga (KK), dengan alokasi minimal sebesar Rp. 1 Juta per KK.

- b. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup.**

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup di wilayah kecamatan adalah proses evaluasi dan analisis terhadap rencana tata ruang wilayah kecamatan, yang mempertimbangkan dampak lingkungan dan berkelanjutan. Ini mencakup penilaian kesesuaian rencana dengan kondisi lingkungan,

potensi dampak, serta upaya mitigasi dan pelestarian lingkungan. Beberapa faktor yang harus diperhatikan yaitu:

1. Kegiatan Pasca Tambang belum Dilakukan dengan Baik.

Kegiatan pertambangan di Kabupaten Kutai Kartanegara, terutama tambang batubara, meninggalkan banyak lahan dengan karakteristik pasca tambang yang merusak. Lubang besar, penurunan muka tanah, dan potensi longsor menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan lingkungan hidup. Proses reklamasi yang seharusnya menjadi kewajiban belum terlaksana optimal, menyebabkan gangguan ekologis jangka panjang serta memperparah kerusakan lahan dan menurunkan nilai produktivitas wilayah.

2. Kerusakan Hutan dan Lahan.

Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami tingkat kerusakan hutan dan perubahan lahan yang cukup tinggi. Penebangan liar, perambahan lahan, dan kegiatan pertambangan ilegal menjadi penyebab utama degradasi kawasan hutan yang luasnya mencapai lebih dari 83% dari total wilayah kabupaten. Dari kawasan ini, sekitar 52% merupakan hutan produksi yang semestinya dijaga keberlanjutannya. Namun, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum mengakibatkan ekosistem hutan rentan rusak dan kehilangan fungsi ekologis.

3. Perubahan Lingkungan Sekitar Perairan Sungai dan Danau.

Perubahan lingkungan juga terlihat nyata di wilayah perairan, pesisir, dan danau. Ekosistem mangrove di Delta Mahakam rusak parah, menyebabkan abrasi meningkat hingga 10 kali lipat dari biasanya. Intrusi air laut di DAS Mahakam memperburuk kualitas air minum masyarakat. Di wilayah 3 Danau (Jempang, Semayang, dan Melintang), menurunnya vegetasi air, kualitas air yang tercemar, serta pendangkalan sungai telah mengganggu sistem hidrologi dan keanekaragaman hayati. Kondisi ini diperparah oleh pembangunan permukiman dan konversi lahan yang tidak terkendali.

4. Alih Fungsi Lahan.

Alih fungsi lahan menjadi isu krusial yang perlu segera diantisipasi. Banyak lahan pertanian produktif di Kabupaten Kutai Kartanegara yang beralih menjadi kawasan tambang, industri, maupun pemukiman tanpa perencanaan yang komprehensif. Hal ini

mengancam ketahanan pangan daerah dan menurunkan daya dukung lingkungan. Ketidadaan regulasi spesifik di tingkat kabupaten mengenai pembatasan alih fungsi lahan memperburuk kondisi, dan menyebabkan konflik ruang serta ketidakseimbangan pembangunan wilayah.

c. Potensi Kecamatan Muara Kaman.

Kecamatan Muara Kaman memiliki potensi yang sangat beragam dan strategis, diantaranya:

1. Kekayaan sektor Sumber Daya Alam.

- Pertanian dan Perkebunan: Potensi sebagai lumbung pangan dengan komoditas seperti padi, semangka, sayuran, kelapa sawit, durian, dan kopi.
- Perikanan: Potensial ikan air tawar dengan genangan air pada area sungai mahakam dan rawa dengan produksi yang cukup, baik hasil tangkapan maupun hasil budidaya, khususnya budidaya ikan dalam keramba.
- Peternakan: Potensi untuk sapi potong, ayam potong, ayam buras, dan kambing.
- Kehutanan: Memiliki kawasan dengan flora dan fauna, khususnya ikan endemik pesut mahakam.
- Pertambangan dan Industri: Potensi pertambangan batu bara dan industri pengolahan CPO.
- Sektor Pariwisata: potensi wisata sejarah dengan adanya Situs Kerajaan Hindu tertua Lesong Batu.

2. Memiliki posisi strategis, berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur di sebelah utara serta juga merupakan daerah bagian dari wilayah Mitra Strategis dengan IKN.

d. Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang relevan dengan kecamatan.

Beberapa isu strategis KLHS RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara yang relevan dengan tugas dan fungsi kecamatan, yaitu: Ketahanan Pangan sebagai Daerah Mitra IKN, Peningkatan Sanitasi dan Distribusi Air Bersih bagi Masyarakat, Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar, Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan, dan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam (Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan, Tanah Longsor).

e. Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD.

1. Aspek Global: Intinya adalah dampak perubahan iklim (seperti banjir, kekeringan) dan tekanan dari permintaan pasar dunia untuk sumber daya alam (misal: sawit, batubara) yang mempengaruhi lingkungan Kecamatan Muara Kaman.
2. Aspek Nasional: Intinya adalah dampak besar dari pembangunan IKN (misal: perubahan lahan, peningkatan sampah, tekanan penduduk) dan pengaruh kebijakan nasional terkait energi/lingkungan terhadap Kecamatan Muara Kaman.
3. Aspek Regional: Intinya adalah masalah lingkungan lokal dan antar wilayah seperti pencemaran sungai, masalah sampah, dan kejadian banjir yang sering terjadi di sekitar Kecamatan Muara Kaman dan Kalimantan Timur.
4. Pengelolaan Sampah: Volume sampah yang tinggi (sekitar 35,7 ton per hari) dengan belum adanya tempat pembuangan akhir (TPA) yang memadai, kurangnya regulasi pengelolaan sampah, dan adanya tempat pembuangan sampah ilegal.
5. Kualitas Air Sungai: Penurunan kualitas mutu air Sungai di wilayah Kecamatan Muara Kaman yang dikategorikan "tercemar sedang" hingga "tercemar parah" di beberapa titik, mengancam ketersediaan air bersih.
6. Banjir: Permasalahan banjir yang masih sering terjadi, terutama di wilayah-wilayah yang terdampak perubahan tata guna lahan atau dampak pembangunan infrastruktur yang kurang terencana (termasuk yang terkait IKN, seperti longsor dan jalan terbelah).

f. Isu Strategis Perangkat Daerah

Setelah menganalisis isu global, nasional, regional, lingkungan strategis eksternal maupun internal, KLHS, serta mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, beberapa isu strategis utama di Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Dampak dan Peluang IKN: Meskipun masuk delineasi IKN, pembangunan infrastruktur fisik dari pemerintah pusat belum signifikan, sementara pengembangan SDM sudah mulai dilakukan. Ada ketidakjelasan peralihan tanggung jawab pembangunan dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat, sehingga pembiayaan dan

pembangunan masih ditangani Pemda Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini menimbulkan tantangan koordinasi dan pemanfaatan peluang IKN secara optimal.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima (*excellent service*) yang cepat, mudah, murah, efisien, dan transparan, serta berbasis elektronik.
3. Peningkatan Infrastruktur: Prioritas perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas pendidikan yang masih sangat minim di beberapa wilayah.
4. Kemiskinan dan Stunting: Tingginya angka kemiskinan dan prevalensi stunting menjadi isu strategis yang membutuhkan program penanggulangan terkoordinasi dan efektif.
5. Pengelolaan Sumber Daya Alam berkelanjutan: Kebutuhan untuk mengelola potensi daerah secara berkelanjutan, mengatasi permasalahan lingkungan akibat eksploitasi (terutama batubara), dan memastikan kelestarian ekosistem.
6. Tata Kelola Pemerintahan: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel berbasis elektronik dan peningkatan kompetensi aparatur.

Berdasarkan pemaparan gambaran umum pelayanan, identifikasi permasalahan, serta analisis mendalam terhadap berbagai isu strategis—termasuk dimensi KLHS dan isu lingkungan dinamis pada skala Global, Nasional, dan Regional—dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Muara Kaman memiliki potensi besar namun juga menghadapi tantangan kompleks yang memerlukan perhatian serius. Pemahaman menyeluruh terhadap kondisi eksisting dan proyeksi isu ke depan ini menjadi landasan krusial dalam merumuskan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kaman. Dengan demikian, langkah selanjutnya adalah menetapkan Visi dan Misi yang jelas, serta merancang program kerja yang adaptif dan solutif untuk mencapai pembangunan Kecamatan Muara Kaman yang lebih maju dan berkelanjutan dalam periode 2025-2029. Adapun teknik penyimpulan Isu Strategis sebagai berikut:

Tabel 2.8 Isu Strategis Kecamatan Muara Kaman.

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD				ISU STRATEGIS PD
			Global	Nasional	Regional	Kutai Kartanegara	
1	2	3	4	5	6	7	8
Pemerintah Daerah mendorong program hilirisasi komoditas unggulan dengan pembangunan industri pengolahan yang terintegrasi dekat sumber bahan baku	Belum optimalnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang sesuai dengan SOP	Ketahanan Pangan sebagai Daerah Mitra IKN	Adanya pergeseran budaya dampak dari Teknologi Informasi	Rendahnya produktivitas	Peluang pembangunan Superhub Ekonomi dan Mitra IKN	Akselerasi pembangunan Kutai Kartanegara sebagai Penyangga IKN	Dampak dan Peluang IKN
Memiliki posisi yang strategis (dekat dengan IKN)	Belum optimalnya efektivitas implementasi program, khususnya pada kewenangan yang sudah dilimpahkan ke kecamatan	Peningkatan sanitasi dan distribusi air bersih bagi masyarakat			Pemerataan pembangunan wilayah	Pemerataan pelayanan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan handal	Peningkatan kualitas Pelayanan Publik
Kekayaan sektor Sumber Daya Alam, antara lain Pertanian dan Perkebunan, Perikanan dan Kelautan, Peternakan, Kehutanan, Pariwisata, serta Pertambangan dan Industri	Masih adanya permasalahan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, konektivitas, trantibum, lingkungan hidup, dan perlindungan sosial terutama terhadap kelompok rentan dan marjinal (perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat miskin, masyarakat adat, dll.)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar		Potensi Sumber Daya Manusia dan Modal	Peningkatan Kualitas dan daya saing SDM	Akselerasi peningkatan daya saing SDM yang sehat dan cerdas	Peningkatan Layanan Infrastruktur
Tingginya partisipasi masyarakat yang berkolaborasi & terlibat Komunitas dalam Pembangunan	Belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Desa	Peningkatan pelayanan Kesehatan Masyarakat		Pergeseran struktur kelas masyarakat			Kemiskinan dan Stunting
Desa Mandiri sebagai pilar ketahanan sosial yang cukup kuat di Kabupaten Kutai Kartanegara	Belum optimalnya tata kelola kecamatan	Perilaku hidup bersih dan sehat					Pengembangan ekonomi dan pengelolaan Sumber Daya Alam berkelanjutan
Ekosistem Pesisir sebagai “Karbon Biru” & Keanekaragaman Hayati,		Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan					Tata Kelola Pemerintahan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD				ISU STRATEGIS PD
			Global	Nasional	Regional	Kutai Kartanegara	
1	2	3	4	5	6	7	8
Penguatan Regulasi Lingkungan terbaru							
		Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam (Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan, Tanah Longsor)					
			Perkembangan Teknologi	Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah	Tata kelola pemerintahan yang baik		

Sumber : hasil analisis, 2025.

Penjelasan masing-masing Isu Strategis Kecamatan Muara Kaman sebagai berikut :

1. Integrasi dengan Pembangunan IKN.

Hadirnya IKN membuka peluang besar untuk pengembangan infrastruktur dan ekonomi lokal di Kecamatan Muara Kaman sebagai bagian dari wilayah mitra. Kecamatan Muara Kaman diproyeksikan akan mengalami perkembangan pesat, baik dari segi infrastruktur maupun migrasi penduduk. Namun, peluang ini juga membawa tantangan besar, terutama terkait tekanan terhadap lahan produktif, potensi konflik tata ruang, dan dampak sosial-ekonomi dari proses urbanisasi yang cepat.

Pemerintah Kecamatan Muara Kaman harus segera menyelaraskan kebijakan tata ruang dengan kebijakan pembangunan IKN untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang. Kolaborasi dengan instansi terkait, termasuk pihak pemerintah pusat, akan menjadi kunci untuk memastikan pembangunan berjalan harmonis. Selain itu, meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dalam proyek pembangunan akan memastikan bahwa manfaat ekonomi dan sosial dari IKN dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah juga harus mengantisipasi dampak sosial-ekonomi dari migrasi penduduk yang dipicu oleh pembangunan IKN, seperti peningkatan kebutuhan akan perumahan, fasilitas umum, dan lapangan pekerjaan.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Sistem pelayanan publik di Kecamatan Muara Kaman masih banyak yang dilakukan secara manual, yang menghambat efisiensi dan transparansi. Dalam era digitalisasi ini, penerapan teknologi informasi menjadi kebutuhan yang mendesak untuk mempercepat proses pelayanan, meningkatkan efisiensi kerja, dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik.

Pemerintah Kecamatan harus segera melakukan digitalisasi administrasi dan pelayanan publik dengan mengadakan perangkat keras dan lunak yang memadai. Selain itu, pelatihan bagi aparatur pemerintah dalam bidang teknologi informasi dan pengembangan aplikasi pelayanan publik sangat diperlukan. Aplikasi pelayanan publik ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, perizinan,

pengelolaan data penduduk, serta mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait kebijakan, program, dan layanan pemerintah.

3. Peningkatan Layanan Infrastruktur.

Meskipun Kecamatan Muara Kaman memiliki potensi besar dalam berbagai sektor, infrastruktur dasar di wilayah ini masih terbatas. Beberapa jalan penghubung antar desa dalam kondisi rusak, fasilitas pelayanan publik kurang memadai, dan akses internet yang terbatas menjadi masalah utama. Kondisi ini menghambat perkembangan ekonomi, akses pendidikan, serta kualitas pelayanan publik.

Untuk mengatasi masalah ini dalam lima tahun mendatang, pemerintah kecamatan perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi perbaikan jalan antar desa, peningkatan fasilitas kantor kecamatan dan kelurahan, serta perluasan jaringan internet untuk mendukung digitalisasi pelayanan publik. Pemerintah juga perlu melakukan perencanaan yang matang dan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten serta sektor swasta untuk memperoleh pendanaan yang diperlukan. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, diharapkan Kecamatan Samboja dapat menjadi kawasan yang lebih terhubung, efisien, dan siap menyambut tantangan pembangunan di masa depan.

4. Kemiskinan dan Stunting.

Kemiskinan dan stunting masih menjadi isu penting di Kecamatan Muara Kaman, dimana kemiskinan dan stunting memiliki korelasi yang positif. Tingginya angka kemiskinan di Kecamatan Muara Kaman bergerak searah dengan tingginya angka stunting. Beberapa langkah konkrit yang dilaksanakan bersama dengan instansi terkait dalam 2 (dua) tahun terakhir belum menampilkan hasil yang maksimal, sehingga diperlukan langkah strategis dan terintegrasi dalam menyelesaikan /menurunkan angka kemiskinan dan stunting di Kecamatan Muara Kaman.

5. Pengembangan Ekonomi, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup.

Kecamatan Muara Kaman memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, termasuk Hutan, Perkebunan, dan Perikanan. Sektor ekonomi lokal di Kecamatan Muara Kaman, seperti Pertanian, Perikanan, dan UMKM, menghadapi berbagai tantangan, antara lain terbatasnya akses ke modal, teknologi, dan pasar. Hal ini menghambat potensi sektor-sektor tersebut untuk berkembang lebih pesat.

Pemerintah Kecamatan Muara Kaman perlu mendorong investasi di sektor hilir, seperti pengolahan hasil pertanian dan perikanan, untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal. Program-program pelatihan berbasis kebutuhan lokal juga harus diadakan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengelola usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, memperkuat koperasi sebagai wadah untuk pelaku UMKM dalam mengakses modal dan pasar perlu menjadi prioritas. Peningkatan akses ke pasar regional dan nasional juga harus dilakukan melalui penguatan infrastruktur transportasi dan promosi produk lokal, sehingga masyarakat Kecamatan Muara Kaman dapat lebih mudah memasarkan hasil pertanian dan perikananannya.

Namun, eksploitasi yang tidak terkendali dapat menimbulkan ancaman serius bagi kelestarian alam. Pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan tanpa memperhatikan prinsip keberlanjutan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, terutama pada kawasan rawa dan sungai. Kontaminasi air akibat limbah domestik dan industri merupakan salah satu masalah besar yang memengaruhi kualitas hidup masyarakat sekitar.

Untuk menghadapi masalah ini dalam lima tahun ke depan, pemerintah kecamatan akan melakukan rehabilitasi lahan kritis khususnya pada lahan bekas tambang. Hal ini diupayakan dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis dan pihak lain termasuk peran masyarakat dan swasta. Program edukasi dan sosialisasi terkait pentingnya pelestarian lingkungan juga akan ditingkatkan, baik kepada masyarakat umum maupun pelaku industri dan usaha. Selain itu, kecamatan dapat memanfaatkan peluang kerjasama dengan IKN untuk implementasi teknologi ramah lingkungan.

6. Tata Kelola Pemerintahan.

Tata kelola Pemerintahan di Kecamatan Muara Kaman diukur dari sejauh mana kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, yaitu pelaksanaan pelayanan publik. Sejauh ini pelaksanaan Pelayanan Publik telah berjalan cukup baik. Kinerja ini tercermin dari angka Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Muara Kaman sebesar 3,97 dengan klasifikasi Baik.

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi berdampak pada pola pikir, gaya hidup dan kebutuhan masyarakat sehingga Tuntutan pelayanan yang efektif, efisien dan transparan tidak dapat dihindari. Kedepan, fokus utama dalam peningkatan tata kelola pemerintahan di Kecamatan Muara Kaman adalah pelayanan berbasis elektronik dan peningkatan kompetensi aparatur.

BAB 3. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan.

Tujuan Renstra Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan Sasaran RPJMD. Tujuan Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 adalah “Meningkatkan Kinerja Pembangunan Kewilayahan di Kecamatan”.

Tujuan tersebut selaras dengan Misi 3 RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029, yaitu ”Terbaik dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Profesionalisme Sumber Aaya Manusia Aparatur Sipil Negara”, dan mendukung sasaran RPJMD yaitu: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, yang berada pada tujuan 2 RPJMD yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berdaya Saing.

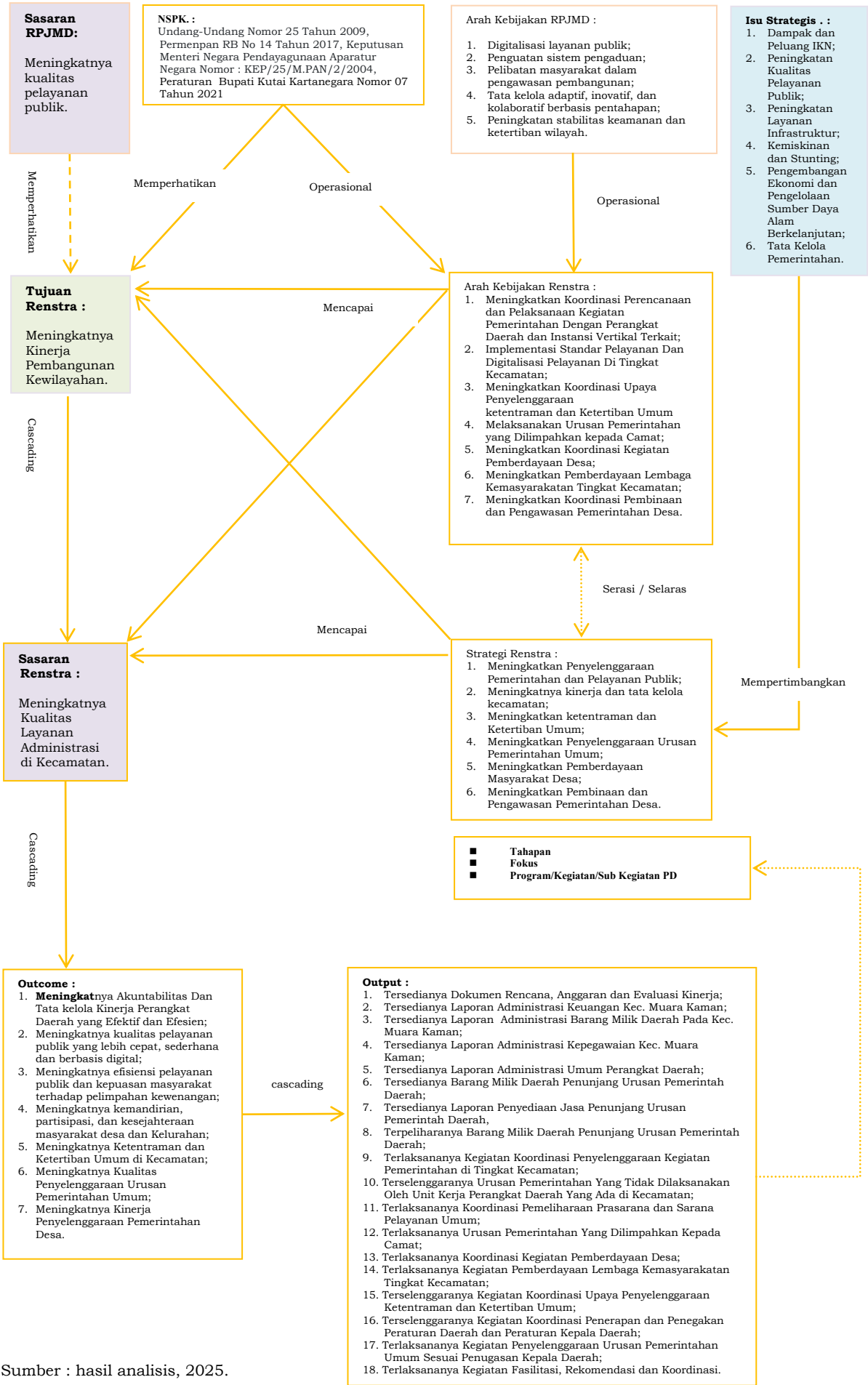
3.2 Sasaran.

Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumberdaya yang akan dikelola oleh Kecamatan Muara Kaman.

Berdasarkan pernyataan Tujuan di atas maka ditetapkanlah Sasaran Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029: “Meningkatnya Layanan Administrasi di Kecamatan”.

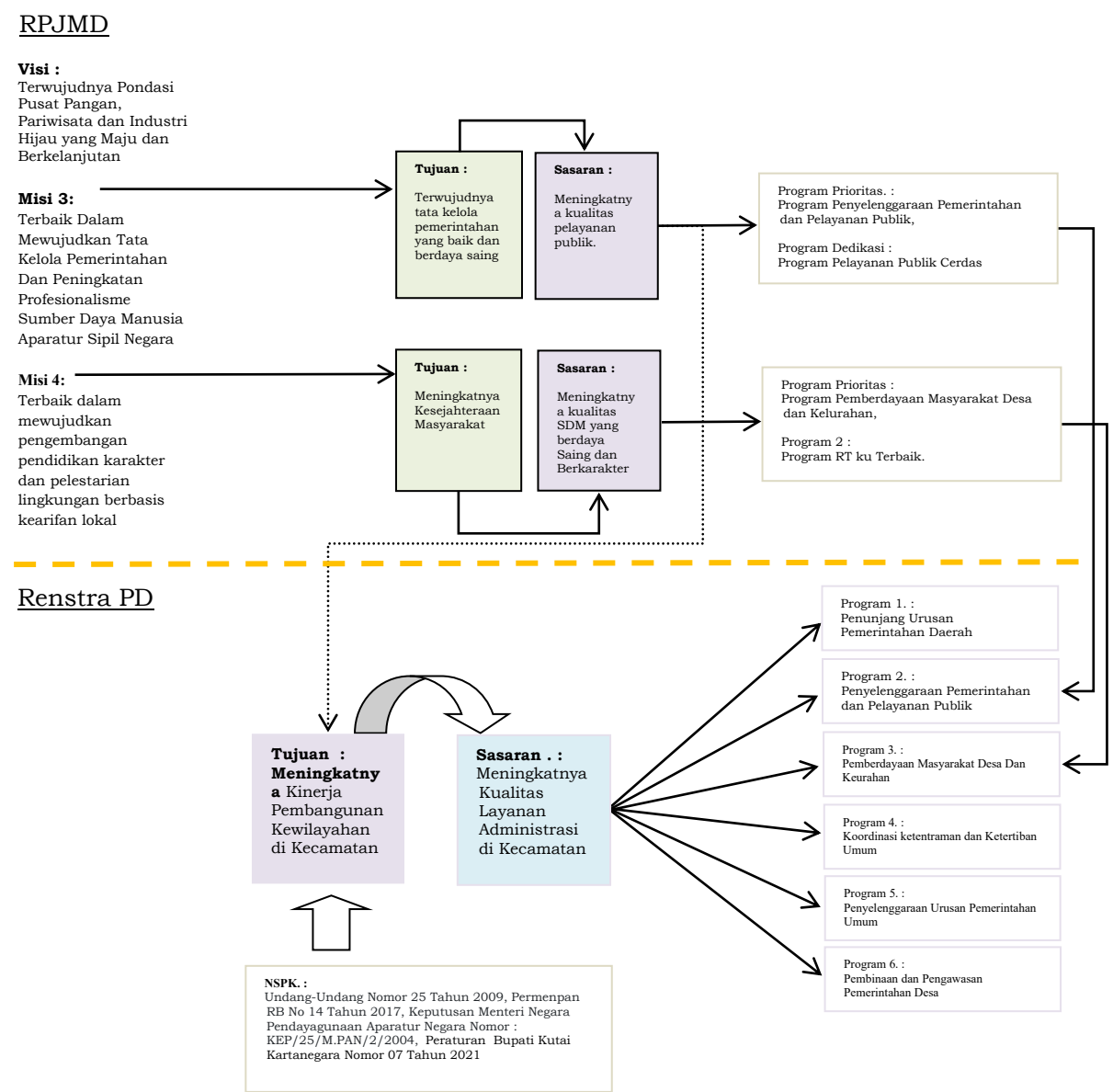
Penetapan Tujuan dan sasaran Kecamatan Muara Kaman didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta didasarkan pada Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara. Kerangka keterkaitan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2030 dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Muara Kaman 2025-2030 secara detail disampaikan dalam gambar di bawah :

Gambar 3.1 Konsep Renja PD



Sumber : hasil analisis, 2025.

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra.



Sumber : hasil analisis, 2025

Rumusan tujuan dan sasaran renstra secara lebih detail disajikan dalam tabel di bawah:

Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Muara Kaman

NSPK Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Base Line 2024	Target Tahunan						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NSPK : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Permenpan RB No 14 Tahun 2017, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004.	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Kewilayahan di Kecamatan	-	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan.	-	3,97	3,98	3,99	4,00	4,01	4,02	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja Pelayanan Publik di lingkungan kecamatan berdasarkan aspek Kebijakan Pelayanan, aspek Profesionalisme SDM, aspek Sarana Prasarana, aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, aspek Konsultasi dan Pengaduan serta aspek Inovasi.
2. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 07 Tahun 2021. 3.PP 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan..		Meningkatnya kualitas layanan administrasi di kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP	95	100	100	100	100	100	100	Jumlah pelayananyang sesuai SOP dibagi total jumlah pelayanan dikali 100.
Sasaran RPJMD : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.		-	Persentase desa yang melaksanakan pdministrasi serta Pengelolaan keuangan yang tertib dan baik	60	65	67	72	75	77	83	Jumlah desa yang tertib administrasi dan keuangan. <u>Penilaian Keuangan :</u> 1. Pengesahan APBDes per 31 Des di aplikasi siskuedes web (20%) Cara hitung: (jumlah desa tepat waktu / jumlah desa di kecamatan). 2. Desa yang optimal menggunakan aplikasi ATKPdes secara 100% (15%) Cara Hitung:Jumlah desa yang optimal menggunakan aplikasi/jumlah desa dikec 3. Persentasi realisasi anggaran (20%) Cara Hitung: jumlah anggaran yang terlaksana 100% / jumlah anggaran desa. <u>Penilaian Administrasi:</u> 1. Penyampaian Perdes LPPDes, Perdes Pertanggungjawaban APBDes tahun sebelumnya dan laporan keterangan kades akhir 31 Maret (10%). cara Hitung: jumlah desa yang menyampaikan di akhir 31 maret/jumlah desa di kec. 2. Penyampaian laporan kinerja BPD per 31 April (10%) Cara Hitung: Jumlah Desa yang menyampaikan laporan per 31 april/jumlah desa. 3. Pengisian Prosdekel dan Sdgs (10%) cara hitung: Jumlah desa yang melakukan pengisian prodeskel dan SDGS/jumlah semua desa. 4. Laporan tahunan keuangan Bumdes (15%) . Cara hitung: Jumlah desa yang melaporkan laporan tahunan keuangan/ jumlah semua desa di kec.

Sumber: hasil analisis, 2025.

3.3 Strategi.

Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Muara Kaman memerlukan serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Strategi memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi.

Tabel 3.2 Strategi Pencapaian Renstra Kecamatan Muara Kaman 2025-2029.

Tujuan	Sasaran	Strategi
1	2	3
Meningkatkan Kinerja Pembangunan Kewilayahan di Kecamatan.	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi di kecamatan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
		Meningkatkan ketentraman dan Ketertiban Umum.
		Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
		Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
		Meningkatnya kinerja dan tata kelola kecamatan.

Sumber: hasil analisis, 2025.

Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, regional, dan kabupaten, serta tantangan global yang dapat mempengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan Daerah.

Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan

daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara secara efektif dan berkelanjutan.

Penyajian lokus (lokasi fokus) dalam Renstra Kecamatan Muara Kaman sangat penting untuk menunjukkan di mana sub kegiatan akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah.

Secara geografis, Kutai Kartanegara diposisikan sebagai Daerah mitra utama IKN. Sebagai Daerah mitra, Kutai Kartanegara akan mendukung kebutuhan IKN khususnya kebutuhan pangan sekaligus akan memperkuat kemandirian ekonomi daerah. Peran ini disikapi dengan kebijakan pembagian zona/wilayah pengembangan pembangunan ekonomi menjadi 3 (tiga) zona, yaitu zona Utara, zona Selatan, dan zona Timur. Kecamatan Muara Kaman masuk dalam wilayah pengembangan ekonomi zona Utara.

Arah kebijakan pembangunan di kawasan zona Utara menitikberatkan pada pembangunan sektor Pertanian, Perkebunan dan Pariwisata karena memiliki karakteristik wilayah yang mendukung kedua sektor tersebut. Penerbitan SK Bupati Kutai Kartanegara Nomor 01.1/590/PL/DPPR/II/2022 tentang Penetapan Kawasan Pertanian Komoditas Padi di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang salah satunya merupakan Kawasan Pertanian Kecamatan Sebulu – Muara Kaman merupakan langkah nyata dalam memperkuat kebijakan tersebut.

Pengembangan Kawasan Pariwisata, Kecamatan Muara Kaman akan fokus pada pengelolaan Pariwisata Sejarah, yaitu pengelolaan situs Kerajaan Hindu tertua yaitu situs “Lesong Batu”.

Dengan demikian, peran Kutai Kartanegara sebagai daerah mitra IKN dalam pembangunan strategis akan memastikan keberlanjutan ekosistem ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dalam pelaksanaan pembangunan di kecamatan, perlu dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Pentahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Muara Kaman. Pentahapan Renstra Perangkat Daerah dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah.

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)
1	2	3	4	5
Pemenuhan fondasi infrastruktur wilayah dan penataan kelembagaan	Pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan	Peningkatan kemanfaatan transformasi pembangunan di Wilayah Kecamatan	Perwujudan fondasi transformasi di Wilayah Kecamatan dalam KUKAR IDAMAN TERBAIK	Pemantapan Menuju Akselerasi Transformasi Pembangunan di Wilayah Kecamatan
Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan	Pengembangan potensi ekonomi unggulan daerah serta penguatan kelembagaan pelaku usaha berbasis masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing lokal.	Penguatan ekosistem kewirausahaan berbasis inovasi dan pemanfaatan potensi lokal sebagai motor pertumbuhan ekonomi berkelanjutan	Perwujudan transformasi produk unggulan berbasis ekonomi hijau sebagai upaya peningkatan nilai tambah, daya saing, dan keberlanjutan pembangunan daerah	Penguatan rantai nilai dan akselerasi hilirisasi komoditas unggulan daerah yang ramah lingkungan guna meningkatkan daya saing dan kesejahteraan
Pembangunan prasarana dan sarana konektivitas (keterkaitan) wilayah	Pengembangan aksesibilitas wilayah dan fasilitas publik berwawasan lingkungan untuk mendukung pemerataan pembangunan.	Pengembangan infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Perwujudan sistem infrastruktur aksesibilitas dan mobilitas yang modern, dan terhubung	Penerapan Integrasi jaringan infrastruktur antar wilayah yang menunjang konektivitas ekonomi dan mengurangi ketimpangan wilayah
Penguatan regulasi dan tata kelola serta infrastruktur digitalisasi pelayanan publik yang adaptif, konsisten dan implementatif	Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah	Penerapan Digitalisasi layanan publik dan penguatan sistem pengawasan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas	Perwujudan tata kelola dan sistem evaluasi pembangunan yang adaptif, konsisten, serta implementatif sebagai instrumen peningkatan kinerja pembangunan.	Penguatan kolaborasi multi pihak (pemerintah, masyarakat, swasta) dalam tata kelola pembangunan
Penguatan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan infrastruktur desa yang berkualitas	Peningkatan ketahanan lingkungan dan sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat	Penerapan Integrasi kebijakan adaptasi perubahan iklim dan mitigasi risiko bencana ke dalam seluruh sektor pembangunan	Pengendalian pencemaran serta optimalisasi kualitas daya dukung lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	Penguatan energi terbarukan dan akselerasi pengurangan emisi karbon untuk mendukung transisi menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan

Sumber: hasil analisis, 2025.

3.4 Arah Kebijakan.

Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan rangkaian kerja operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Arah Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan Strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai Tujuan dan Sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rumusan Arah Kebijakan merasionalkan pilihan Strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus Pembangunan setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Muara Kaman sebagai berikut:

Tabel 3.4 Teknik merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah.

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Penyelenggaraan Pelayanan Yang Prima	Digitalisasi layanan publik	Implementasi Standar Pelayanan Dan Digitalisasi Pelayanan Di Tingkat Kecamatan	Melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
2	Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Perizinan	Penguatan sistem pengaduan	Meningkatkan Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
3	Pembinaan Dan Pengawasan Administrasi Desa dan Kelurahan	Pelibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan	Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
4	Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	Tata kelola adaptif, inovatif, dan kolaboratif berbasis pentahapan	Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Menyesuaikan Dengan Pelimpahan Urusan Dari Bupati
5	Peningkatan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah	Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dilakukan Melalui Monitoring Dan Laporan Realisasi pada Desa
7			Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
8			Meningkatkan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum	
9			Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
10			Meningkatkan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

Sumber: hasil analisis, 2025.

Kerangka keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 3.5 Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.

Visi		Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju dan Berkelanjutan.					
Misi		Terbaik Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara.					
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1	Meningkatkan Kinerja Pembangunan Kewilayahan di Kecamatan.	1	Meningkatnya Layanan Administrasi di Kecamatan.	1.1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.1.1	Meningkatkan Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.
						1.1.2	Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di

Visi		Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju dan Berkelanjutan.					
Misi		Terbaik Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara.					
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
							Kecamatan
						1.1.3	Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
				1.2	Meningkatnya kinerja dan tata kelola kecamatan	1.2.1	Implementasi Standar Pelayanan Dan Digitalisasi Pelayanan Di Tingkat Kecamatan
				1.3	Meningkatkan ketentraman dan Ketertiban Umum	1.3.1	Meningkatkan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum
				1.4	Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.4.1	Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
		2	Meningkatnya Desa yang melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang tertib dan Baik	2.1	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.1.1	Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
						2.1.2	Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
				2.2	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.2.1	Meningkatkan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sumber: hasil analisis, 2025

BAB 4. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

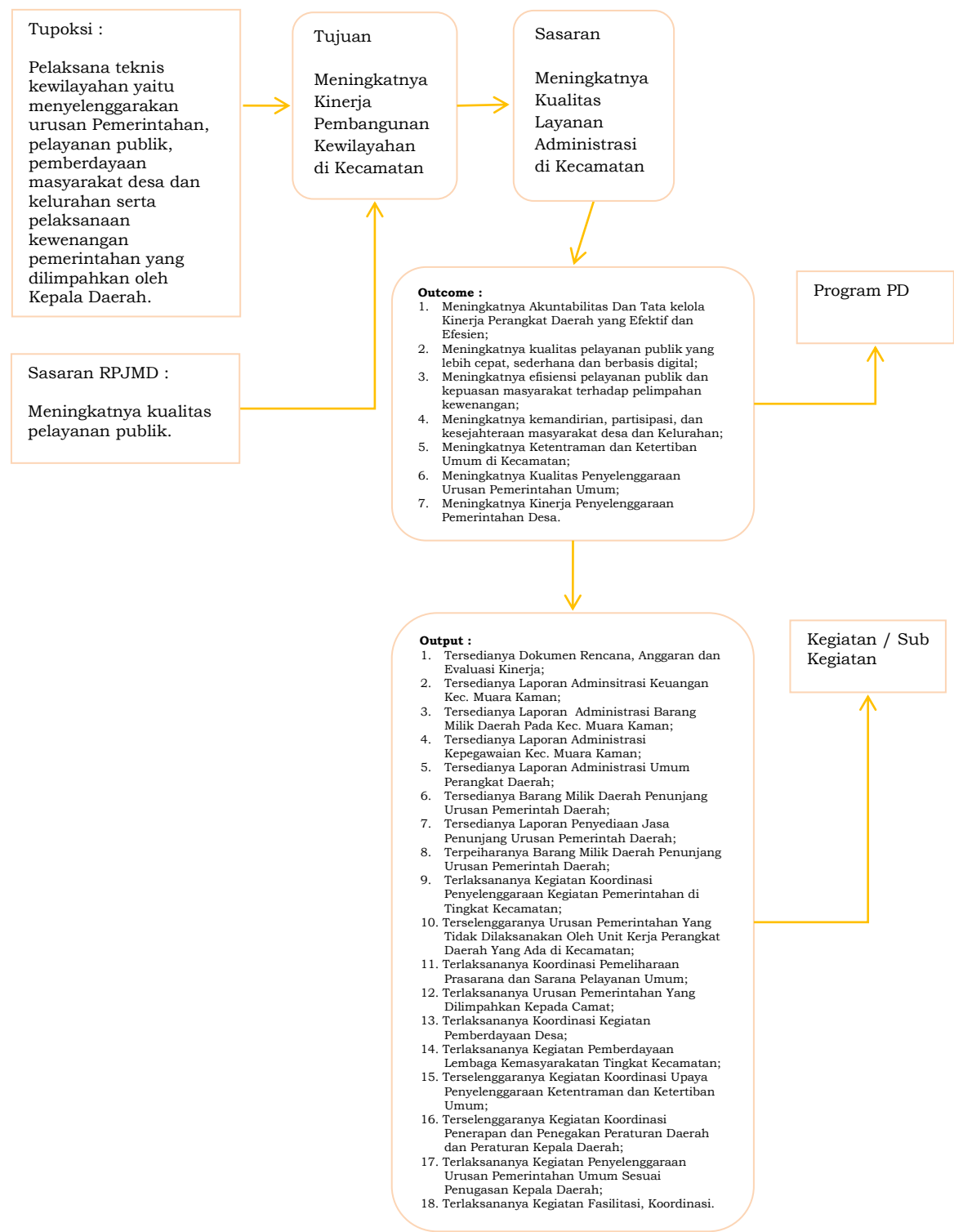
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi kumpulan kegiatan-sub kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu Perangkat Daerah guna mencapai Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan serangkaian aksi nyata dan terukur, dilaksanakan dalam periode tertentu oleh Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran sesuai dengan Program yang telah ditentukan.

Program dan Kegiatan yang terukur dan terarah mencakup indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu Program Urusan dan Program Non Urusan. Program Urusan berfungsi untuk mencapai Tujuan Perangkat Daerah yang telah sinergikan dengan Tujuan Daerah sedangkan Program Non Urusan adalah Program kesekretariatan yang berfungsi untuk melayani rumah tangga dalam rangka menunjang tujuan Dinas.

Penyusunan Program dan Kegiatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 2024 Nomor 900.1.15.5-3406 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Unsur urusan kewilayahan. Kerangka logis perumusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Muara Kaman di sajikan pada gambar di bawah :

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Muara Kaman.



Sumber : hasil analisis, 2025

Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Muara Kaman.

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
NSPK : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Permenpan RB No 14 Tahun 2017, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2 /2004	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Kewilayahan di Kecamatan	-	-	-	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan.	-	
NSPK : Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 07 Tahun 2021	-	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi di Kecamatan	-	-	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP.	-	
Sasaran RPJMD : Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis IT					Persentase Desa yang melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang tertib dan Baik.		
			Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tata kelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien.		Nilai Sakip Perangkat Daerah.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota.	
				Tersedianya Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja.	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Tersedianya Laporan Adminsitration Keuangan Kec. Muara Kaman	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Kec. Muara Kaman	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan/Semes teran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan/Semes teran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan/Semes teran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.	Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Kec. Muara Kaman	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Kec. Muara Kaman	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah.	
				Tersedianya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Pengamanan Barang Miik Daerah SKPD	Jumah Dokumen Pengamanan Barang Miik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Miik Daerah SKPD	
				Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Miik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Miik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Miik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Miik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Miik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	
				Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Kec. Muara Kaman	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Kec. Muara Kaman	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	
				Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah.	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Paket Peralatan Kantor (PC, Laptop, Printer)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Disediakan.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Disediakan.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan.	Penyediaan Bahan / Material	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah Disediakan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumah Paket Mebel Yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan.	Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Sarana Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	umlah Unit Sarana Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan.	Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeiharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dipelihara	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Dipelihara dan dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi.	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi.	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						URUSAN	
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital		Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Program Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
			Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan		Indeks pelimpahan kewenangan pada Kecamatan.		
				Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Terlaksananya Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di	Jumlah Laporan Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	Kegiatan Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kecamatan	Yang Ada di Kecamatan	Daerah Yang Ada di Kecamatan	
				Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.	Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
				Terlaksananya Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan / Atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan / Atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan / Atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
				Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum Yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum Yang Dipelihara Dengan Melibatkan Pihak Swasta	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum Yang Melibatkan Pihak Swasta	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Non Perijinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perijinan Pada Urusan Pemerintahan.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Non Perijinan	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan.	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan.	
			Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan Kelurahan.		Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.	
				Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Diselenggarakan	Penyelenggaraa n Lembaga Kemasyarakata n	
				Meningkatkan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakata n	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Yang Disediakan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakata n	
				Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
			Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan.		Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang ditangani.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
				Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketentraman dan Ketertiban Umum	
				Terlaksananya Sinergitas dengan Keposian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Keposian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.	Sinergitas dengan Keposian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.	
				Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
				Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Peraturan Perundang-Undangan dan / atau Kepolisian Negara Repubik Indonesia.	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Peraturan Perundang-Undangan dan / atau Kepolisian Negara Repubik Indonesia.	Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Peraturan Perundang-Undangan dan / atau Kepolisian Negara Repubik Indonesia.	
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum	
				Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang Yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
				Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras,	umlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras,	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras,	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				dan Golongan lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Beragama, Ras, dan Golongan lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	dan Golongan lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	
				Laporan Penanganan Konflik Sosial.	Jumlah Laporan Konflik Sosial Yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
			Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.		Persentase Desa yang memiliki predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dallam Rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturann Kepala Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	

Sumber: hasil analisis, 2025.

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan indikatornya dalam tabel di atas, dielaborasi lebih lanjut dengan menampilkan target kinerja beserta pendanaan indikatifnya setiap periode 1 (satu) tahun selama 5 (lima) tahun ke depan disajikan secara lebih detail pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Muara Kaman 2025-2030.

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				19.488.119.65 8,00		63.756.067.53 7,97		65.370.759.55 0,70		68.863.465.39 4,55		71.635.029.757 ,88		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				11.739.917.65 8,00		14.454.917.65 8,00		13.669.917.65 8,00		12.979.917.65 8,00		13.379.917.658 ,00		
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Muara Kaman)	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	71,05	73	11.739.917.65 8,00	74	14.454.917.65 8,00	75	13.669.917.65 8,00	76	12.979.917.65 8,00	77	13.379.917.658 ,00	7.01.1.03.0.00.10.000 0 - Kecamatan Muara Kaman	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				370.000.000,0 0		515.000.000,0 0		415.000.000,0 0		515.000.000,0 0		415.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)			370.000.000,0 0	1	515.000.000,0 0		415.000.000,0 0	1	515.000.000,0 0		415.000.000,00		
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	200	42		42		42		42		42			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		3			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	4		4		4		4		4			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Laporan)													
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1			1		1		1		1			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				40.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	40.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	3	100.000.000,00		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja				30.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
SKPD														
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	12	30.000.000,00	12	70.000.000,00	12	70.000.000,00	12	70.000.000,00	12	70.000.000,00		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				50.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	4	50.000.000,00	4	60.000.000,00	4	60.000.000,00	4	60.000.000,00	4	60.000.000,00		
7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				250.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	200	42	250.000.000,00	42	150.000.000,00	42	150.000.000,00	42	150.000.000,00	42	150.000.000,00		
7.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				0,00		100.000.000,00		0,00		100.000.000,00		0,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun			0,00	1	100.000.000,00		0,00	1	100.000.000,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Dokumen)													
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.859.917.658, 00		9.919.917.658, 00		9.919.917.658, 00		9.919.917.658, 00		9.919.917.658, 00		
Tersedianya Laporan Adminsitrası Keuangan Kec. Muara Kaman	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	9.859.917.658, 00	1	9.919.917.658, 00	1	9.919.917.658, 00	1	9.919.917.658, 00	1	9.919.917.658, 00		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ bulan)	61	89		89		89		89		89			
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)				12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1			1		1		1		1			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				9.649.917.658, 00		9.649.917.658, 00		9.649.917.658, 00		9.649.917.658, 00		9.649.917.658, 00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	61	89	9.649.917.658, 00	89	9.649.917.658, 00	89	9.649.917.658, 00	89	9.649.917.658, 00	89	9.649.917.658, 00		
7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)			0,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				200.000.000,0 0		200.000.000,0 0		200.000.000,0 0		200.000.000,0 0		200.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se	12	12	200.000.000,0 0	12	200.000.000,0 0	12	200.000.000,0 0	12	200.000.000,0 0	12	200.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
steran SKPD	mesteran SKPD (Laporan)													
7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1		0,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				105.000.000,0 0		255.000.000,0 0		255.000.000,0 0		255.000.000,0 0		255.000.000,00		
Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Kec. Muara Kaman	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	105.000.000,0 0	1	255.000.000,0 0	1	255.000.000,0 0	1	255.000.000,0 0	1	255.000.000,00		
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12			12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)				1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
7.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				50.000.000,00		100.000.000,0 0		100.000.000,0 0		100.000.000,0 0		100.000.000,00		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	100.000.000,0 0	1	100.000.000,0 0	1	100.000.000,0 0	1	100.000.000,00		
7.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)			0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)			0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00		
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12		0,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0,00		450.000.000,0 0		200.000.000,0 0		450.000.000,0 0		200.000.000,00		
Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Kec. Muara Kaman	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0,00	1	450.000.000,0 0		200.000.000,0 0	1	450.000.000,0 0		200.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1			4		4		4		4			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1			1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)				10		10		10		10			
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)				1				1					
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)				20		20		20		20			
7.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0,00		50.000.000,00		0,00		50.000.000,00		0,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)			0,00	1	50.000.000,00		0,00	1	50.000.000,00		0,00		
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		200.000.000,0 0		0,00		200.000.000,0 0		0,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0,00	1	200.000.000,0 0		0,00	1	200.000.000,0 0		0,00		
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Administrasi Kepegawaian														
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1		0,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00		
7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)			0,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00		
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)			0,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				380.000.000,00		790.000.000,00		605.000.000,00		615.000.000,00		615.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	380.000.000,0 0	3	702.000.000,0 0	3	517.000.000,0 0	3	527.000.000,0 0	3	527.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	100	50		100		100		100		100			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)				1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2			1				1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1			5		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		10.000.000,00		0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0,00	1	10.000.000,00		0,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				150.000.000,0 0		150.000.000,0 0		150.000.000,0 0		150.000.000,0 0		150.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	150.000.000,0 0	3	150.000.000,0 0	3	150.000.000,0 0	3	150.000.000,0 0	3	150.000.000,00		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		200.000.000,0 0		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0,00	5	200.000.000,0 0	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.000.000,0 0		100.000.000,0 0		100.000.000,0 0		100.000.000,0 0		100.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	100.000.000,0 0	1	100.000.000,0 0	1	100.000.000,0 0	1	100.000.000,0 0	1	100.000.000,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Barang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Cetakan dan Penggandaan	Disediakan (Paket)													
7.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)			0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75.000.000,00		162.000.000,0 0		162.000.000,0 0		162.000.000,0 0		162.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	100	50	75.000.000,00	100	162.000.000,0 0	100	162.000.000,0 0	100	162.000.000,0 0	100	162.000.000,00		
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				25.000.000,00		1.525.000.000, 00		1.275.000.000, 00		225.000.000,0 0		975.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		25.000.000,00	1	1.525.000.000,00	1	1.275.000.000,00		225.000.000,00		975.000.000,00		
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)										2			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4			2				1		1			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5					5				5			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1			1		1							
7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		0,00		0,00		700.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)			0,00		0,00		0,00		0,00	2	700.000.000,00		
7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau				0,00		700.000.000,00		700.000.000,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Lapangan														
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0,00	1	700.000.000,0 0	1	700.000.000,0 0		0,00		0,00		
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		0,00		50.000.000,00		0,00		50.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5		0,00		0,00	5	50.000.000,00		0,00	5	50.000.000,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		500.000.000,0 0		500.000.000,0 0		0,00		0,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0,00	1	500.000.000,0 0	1	500.000.000,0 0		0,00		0,00		
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		300.000.000,0 0		0,00		200.000.000,0 0		200.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		0,00	2	300.000.000,0 0		0,00	1	200.000.000,0 0	1	200.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				300.000.000,0 0		300.000.000,0 0		300.000.000,0 0		300.000.000,0 0		300.000.000,00		
Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	300.000.000,0 0	12	388.000.000,0 0	12	388.000.000,0 0	12	388.000.000,0 0	12	388.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12			12		12		12		12			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				270.000.000,0 0		270.000.000,0 0		270.000.000,0 0		270.000.000,0 0		270.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	270.000.000,0 0	12	270.000.000,0 0	12	270.000.000,0 0	12	270.000.000,0 0	12	270.000.000,00		
7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	1	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)													
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		88.000.000,00		88.000.000,00		88.000.000,00		88.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		0,00	12	88.000.000,00	12	88.000.000,00	12	88.000.000,00	12	88.000.000,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		
Terpeiharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	2		2		2		2		2			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	11	11		11		11		11		11			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4	4		4		4		4		4			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	11	11	60.000.000,00	11	60.000.000,00	11	60.000.000,00	11	60.000.000,00	11	60.000.000,00		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4	4	75.000.000,00	4	75.000.000,00	4	75.000.000,00	4	75.000.000,00	4	75.000.000,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				500.000.000,0 0		500.000.000,0 0		500.000.000,0 0		500.000.000,0 0		500.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	2	500.000.000,0 0	2	500.000.000,0 0	2	500.000.000,0 0	2	500.000.000,0 0	2	500.000.000,00		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				7.012.202.000, 00		9.641.149.879, 97		12.170.841.89 2,70		16.353.547.73 6,55		18.825.112.099 ,88		
Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan (Muara Kaman)	Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan (Nilai)		3	6.437.202.000, 00	3	8.441.149.879, 97	3	10.970.841.89 2,70	3	15.153.547.73 6,55	3	17.625.112.099 ,88	7.01.1.03.0.00.10.000 0 - Kecamatan Muara Kaman	
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.437.202.000, 00		8.441.149.879, 97		10.970.841.89 2,70		15.153.547.73 6,55		17.625.112.099 ,88		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	180	27	6.437.202.000,00	40	8.441.149.879,97	54	10.970.841.892,70	70	15.153.547.736,55	81	17.625.112.099,88		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	5	17		16		16		16		16			
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				1.052.202.000,00		1.358.202.000,00		1.358.202.000,00		1.358.202.000,00		1.358.202.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	5	17	1.052.202.000,00	16	1.358.202.000,00	16	1.358.202.000,00	16	1.358.202.000,00	16	1.358.202.000,00		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5.385.000.000,00		7.082.947.879,97		9.612.639.892,70		13.795.345.736,55		16.266.910.099,88		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	180	27	5.385.000.000,00	40	7.082.947.879,97	54	9.612.639.892,70	70	13.795.345.736,55	81	16.266.910.099,88		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital (Muara Kaman)	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP (%)	75	81,25	575.000.000,00	87,5	1.200.000.000,00	93,75	1.200.000.000,00	93,75	1.200.000.000,00	100	1.200.000.000,00		
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat				450.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kecamatan														
Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1	2	450.000.000,00	6	700.000.000,00	6	700.000.000,00	6	700.000.000,00	6	700.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	1		2		2		2		2			
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				200.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1	2	200.000.000,00	6	350.000.000,00	6	350.000.000,00	6	350.000.000,00	6	350.000.000,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				250.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	1	250.000.000,00	2	350.000.000,00	2	350.000.000,00	2	350.000.000,00	2	350.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Dokumen)													
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				100.000.000,0 0		225.000.000,0 0		225.000.000,0 0		225.000.000,0 0		225.000.000,00		
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	100.000.000,0 0	4	225.000.000,0 0	4	225.000.000,0 0	4	225.000.000,0 0	4	225.000.000,00		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)				1		1		1		1			
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)			0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				100.000.000,0 0		200.000.000,0 0		200.000.000,0 0		200.000.000,0 0		200.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	100.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00		
7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				25.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta (Unit)	1		25.000.000,00	1	275.000.000,00	1	275.000.000,00	1	275.000.000,00	1	275.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)		1		1		1		1		1			
7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana		1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Umum	Pelayanan Umum (Dokumen)													
7.01.02.2.03.0002 - Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta				0,00		250.000.000,0 0		250.000.000,0 0		250.000.000,0 0		250.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum dengan Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta (Unit)	1		0,00	1	250.000.000,0 0	1	250.000.000,0 0	1	250.000.000,0 0	1	250.000.000,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				406.000.000,0 0		38.755.000.00 0,00		38.655.000.00 0,00		38.555.000.00 0,00		38.555.000.000 ,00		
Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan (Muara Kaman)	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa /Kelurahan Yang Aktif (%)	60	70	406.000.000,0 0	75	38.755.000.00 0,00	80	38.655.000.00 0,00	85	38.555.000.00 0,00	90	38.555.000.000 ,00	7.01.1.03.0.00.10.000 0 - Kecamatan Muara Kaman	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				100.000.000,0 0		150.000.000,0 0		150.000.000,0 0		150.000.000,0 0		150.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	100.000.000,0 0	2	150.000.000,0 0	2	150.000.000,0 0	2	150.000.000,0 0	2	150.000.000,00		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10	10		10		10		10		10			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Lembaga Kemasyarakatan)													
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	10	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				50.000.000,00		100.000.000,0 0		100.000.000,0 0		100.000.000,0 0		100.000.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	50.000.000,00	2	100.000.000,0 0	2	100.000.000,0 0	2	100.000.000,0 0	2	100.000.000,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				306.000.000,0 0		38.605.000.00 0,00		38.505.000.00 0,00		38.405.000.00 0,00		38.405.000.000 ,00		
Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)			306.000.000,0 0	1	38.605.000.00 0,00		38.505.000.00 0,00		38.405.000.00 0,00		38.405.000.000 ,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)				2		2							
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)				4		2		2		2			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)		5		8		8		8		8			
	Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)				1		1		1		1			
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				306.000.000,00		38.170.000.000,00		38.170.000.000,00		38.170.000.000,00		38.170.000.000,00		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)		5	306.000.000,00	8	38.170.000.000,00	8	38.170.000.000,00	8	38.170.000.000,00	8	38.170.000.000,00		
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				0,00		200.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)			0,00	4	200.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan				0,00		100.000.000,0 0		100.000.000,0 0		0,00		0,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)			0,00	2	100.000.000,0 0	2	100.000.000,0 0		0,00		0,00		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				0,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)			0,00	1	35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
7.01.03.2.03.0005 - Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				0,00		100.000.000,0 0		100.000.000,0 0		100.000.000,0 0		100.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)			0,00	1	100.000.000,0 0	1	100.000.000,0 0	1	100.000.000,0 0	1	100.000.000,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				150.000.000,0 0		175.000.000,0 0		175.000.000,0 0		175.000.000,0 0		175.000.000,00		
Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat (Muara	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)	80	90	150.000.000,0 0	90	175.000.000,0 0	90	175.000.000,0 0	100	175.000.000,0 0	100	175.000.000,00	7.01.1.03.0.00.10.000 0 - Kecamatan Muara Kaman	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kaman)														
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum				150.000.000,0 0		150.000.000,0 0		150.000.000,0 0		150.000.000,0 0		150.000.000,00		
Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1	4	150.000.000,0 0	3	150.000.000,0 0	3	150.000.000,0 0	3	150.000.000,0 0	3	150.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				25.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	25.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan				125.000.000,0 0		100.000.000,0 0		100.000.000,0 0		100.000.000,0 0		100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tokoh Masyarakat														
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1	4	125.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Perenapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)			0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik			0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Indonesia	Indonesia (Laporan)													
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				180.000.000,0 0		525.000.000,0 0		525.000.000,0 0		525.000.000,0 0		525.000.000,00		
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Muara Kaman)	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	60	70	180.000.000,0 0	75	525.000.000,0 0	80	525.000.000,0 0	85	525.000.000,0 0	90	525.000.000,00	7.01.1.03.0.00.10.000 0 - Kecamatan Muara Kaman	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				180.000.000,0 0		525.000.000,0 0		525.000.000,0 0		525.000.000,0 0		525.000.000,00		
Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	200	200	180.000.000,0 0	300	525.000.000,0 0	300	525.000.000,0 0	300	525.000.000,0 0	300	525.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)				1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)				1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)				200		200		200		200			
7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)			0,00	200	50.000.000,00	200	50.000.000,00	200	50.000.000,00	200	50.000.000,00		
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				180.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	200	200	180.000.000,00	300	400.000.000,00	300	400.000.000,00	300	400.000.000,00	300	400.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Orang)													
7.01.05.2.01.0005 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)			0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)			0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				0,00		205.000.000,00		175.000.000,00		275.000.000,00		175.000.000,00		
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa (Muara Kaman)	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik (%)	60	70	0,00	73	205.000.000,00	75	175.000.000,00	80	275.000.000,00	85	175.000.000,00	7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kecamatan Muara Kaman	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan				0,00		205.000.000,00		175.000.000,00		275.000.000,00		175.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Desa														
Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)			0,00	1	205.000.000,00	1	175.000.000,00	1	275.000.000,00	1	175.000.000,00		
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	1			1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)				5		6		23		6			
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)				1		1		1		1			
7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)			0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)			0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	1		0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				0,00		80.000.000,00		50.000.000,00		150.000.000,0 0		50.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)			0,00	5	80.000.000,00	6	50.000.000,00	23	150.000.000,0 0	6	50.000.000,00		

Sumber : hasil analisis 2025.

4.2 Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.

Dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2029, terdapat Program Prioritas Pembangunan Daerah yang unsur pelaksanaannya di kecamatan, termasuk Kecamatan Muara Kaman. Keadaan ini mengharuskan perumusan Kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung untuk memastikan terlaksananya Program Prioritas. Rumusan kegiatan/sub kegiatan pendukung tersaji dalam tabel :

Tabel 4.3 Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program RT Ku-Terbaik.	Terlaksananya Program RT di Kecamatan.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.	
2	Program Pelayanan Publik Cerdas.	Terselenggaranya Mini Mall Pelayanan Publik di kecamatan.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan.	

Sumber: hasil analisis, 2025.

4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja adalah ukuran untuk menilai keberhasilan setiap unit kerja. Indikator kinerja juga dapat digambarkan sebagai ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama *entitas*. *Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Dari beberapa Indikator Kinerja Kecamatan Muara Kaman Tahun 2025-2029, yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, mengacu pada Kinerja Tujuan dan Sasaran, secara lebih detail dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Muara Kaman.

No	Indikator	Satuan	Base Line 2024	Target Tahun						Ket/Definisi Operasional
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan.	Nilai	-	3,97	3,98	3,99	4,00	4,01	4,02	Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Kecamatan berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.
2	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP.	Persen	95	100	100	100	100	100	100	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah pelayanan administrasi publik yang dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.
3	Persentase Desa yang melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang tertib dan Baik.	Persen	60	65	67	72	75	77	83	Jumlah Desa yang melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Desa, baik secara administrasi maupun Keuangan berdasarkan Kriteria yang telah ditetapkan.

Sumber: hasil analisis, 2025.

Definisi Operasional dari masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Muara Kaman sebagai berikut :

1. Indeks Pelayanan Publik Kecamatan.
Adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Kecamatan berdasarkan aspek Kebijakan Pelayanan, aspek Profesionalisme SDM, aspek Sarana Prasarana, aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.
2. Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP.
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah pelayanan administrasi publik yang dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.

3. Persentase Desa yang melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang tertib dan baik.

Adalah Jumlah desa yang melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Desa, baik secara Administrasi maupun Keuangan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu :

- Pengesahan APBDes per 31 Des di aplikasi Siskeudes Web.
- Desa yang optimal menggunakan aplikasi ATKPdes secara 100%.
- Presentasi realisasi anggaran.
- Penyampaian Perdes LPPD, Perdes pertanggungjawaban APBDes tahun sebelumnya dan laporan keterangan kades akhir 31 Maret.
- Penyampaian laporan kinerja BPD per 31 April.
- Pengisian Prosdekel dan Sdgs.
- Laporan tahunan keuangan Bumdes.

Cara Perhitungan dari masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Muara Kaman sebagai Berikut :

1. Indeks Pelayanan Publik Kecamatan.

Cara Hitung : $\text{Nilai Indeks} = \sum (\text{Nilai aspek } n \times \text{Bobot Aspek } n)$

2. Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP.

Cara Hitung : $\text{Jumlah Pelayanan dilaksanakan Sesuai SOP} / \text{Jumlah Layanan} \times 100$.

3. Persentase Desa yang melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang tertib dan Baik.

Cara Hitung, berdasarkan masing-masing Kriteria :

Kriteria Administrasi,

- Pengesahan APBDes per 31 Des di aplikasi siskuedes web, Bobot 20%.

Cara hitung : $\text{Jumlah desa tepat waktu} / \text{Jumlah desa di kecamatan}$.

- Desa yang optimal menggunakan aplikasi ATKPdes secara 100%, Bobot 15%.

Cara Hitung : $\text{Jumlah desa yang optimal menggunakan aplikasi} / \text{Jumlah desa di kecamatan}$.

- Persentasi realisasi anggaran, Bobot 20%.

Cara Hitung : $\text{Jumlah anggaran yang terlaksana 100\%} / \text{Jumlah anggaran desa}$.

Kriteria Keuangan,

- Penyampaian Perdes LPPD, Perdes Pertanggungjawaban APBDes tahun sebelumnya dan laporan keterangan kades akhir 31 Maret, Bobot 10%.
Cara Hitung : $\frac{\text{Jumlah desa yang menyampaikan di akhir 31 maret}}{\text{jumlah desa di kec.}}$
- Penyampaian laporan kinerja BPD per 31 April (10%)
Cara Hitung : $\frac{\text{Jumlah Desa yang menyampaikan laporan per 31 april}}{\text{Jumlah desa.}}$
- Pengisian Prosdekel dan Sdgs Bobot 10%.
cara hitung : $\frac{\text{Jumlah desa yang melakukan pengisian prodeskel dan SDGS}}{\text{Jumlah semua desa.}}$
- Laporan tahunan keuangan Bumdes, Bobot 15%.
Cara hitung: $\frac{\text{Jumlah desa yang melaporkan laporan tahunan keuangan}}{\text{Jumlah semua desa di kecamatan.}}$

BAB 5. PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2030 yang memuat tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan merupakan acuan bagi pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Muara Kaman. Untuk itu perlu disosialisasikan kepada masyarakat selaku sasaran pembangunan, khususnya masyarakat pada wilayah Kecamatan Muara Kaman.

Dengan dijalankannya Renstra ini secara konsisten diharapkan akan tercipta kesatuan gerak dari *stakeholders* dalam rangka menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang efektif dan efisien. Komunikasi yang intensif yang didasari semangat melayani dan profesional harus terus dikembangkan agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh masyarakat di Kecamatan Muara Kaman.

Melalui Musrenbangdes, Musrenbangcam, Forum SKPD, Rencana Strategis ini kemudian akan dipertajam dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk selanjutnya akan menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam menyusun Renja, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mempedomani Renstra. Dokumen Renstra akan menjadi dasar evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan selama periode 2025-2030.

Pada akhirnya sebuah dokumen perencanaan harus segera diimplementasikan kedalam aksi nyata. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh Aparatur dan Stakeholders sangat diperlukan agar seluruh rencana dapat diwujudkan dengan baik.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya dalam pelaksanaan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara. Amin Yaa Robbal Alamin.

Muara Kaman, 23 Januari 2026
CAMAT,



Hj. Earliang, S.Sos